

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 55 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI NTB

**RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2019 – 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Semangat reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tercermin dari kebijakan reformasi birokrasi yang telah digulirkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Pada Peraturan Presiden tersebut dengan gamblang disebutkan bahwa sasaran yang hendak dicapai, di antaranya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Karenanya sudah seharusnya semua institusi pemerintah, dari pusat hingga pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas birokrasi di setiap instansi pemerintah dengan memanfaatkan segenap potensi dan sumber daya yang ada.

Salah satu potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada proses-proses kerja di pemerintahan dan layanan publik sesungguhnya telah berjalan lama dan menjadi kebutuhan yang penting. Penggunaan TIK terbukti dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengolahan data dan pengelolaan informasi dalam skala besar hingga mendukung sistem manajemen untuk pengambilan keputusan. Sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi maka pemanfaatan TIK akan mendukung layanan publik yang baik dan meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dan transparansi dalam proses birokrasi. Untuk mewujudkan layanan ini, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan dalam bentuk 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi, dimana salah satunya adalah Pengembangan Sistem e-Government berupa implementasi e-office, e-planning, e-budgeting, e-procurement serta e-Performance.

Peran strategis TIK dalam pemerintahan juga telah diakui oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan presiden tersebut menyebutkan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lebih jauh lagi kebijakan ini menghendaki adanya peningkatan keterpaduan dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem

pemerintahan berbasis elektronik sehingga diperlukan adanya tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses kerja dan sistem manajemen pemerintahan di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesungguhnya juga telah berlangsung cukup lama dan terdapat di setiap unit kerja pemerintahan. TIK telah menyebar dalam setiap bidang pekerjaan, mulai dari sekadar kerja administratif, perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi, hingga fungsi strategis dalam pengambilan keputusan pimpinan. Banyak infrastruktur TIK yang telah dibangun, dari yang sekadar perangkat keras komputer beserta pendukungnya, hingga jaringan komputer dan internet berskala menengah. Dari sisi aplikasi komputer, berbagai macam aplikasi telah dikembangkan untuk mendukung berbagai jenis fungsi pekerjaan mulai dari fungsi pelayanan, administratif dan manajemen, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen keuangan, dan manajemen kepegawaian. Implementasi TIK yang telah berjalan ini diharapkan mampu menjadi katalisator untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik dan proses-proses pemerintahan yang efisiensi, transparan dan akuntabel.

Meskipun pemanfaatan TIK telah menyebar dan melingkupi berbagai bidang pekerjaan di Pemerintah Provinsi NTB, namun dari sisi pengelolaannya masih dinilai belum optimal. Ini setidaknya tercermin dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi SPBE pada tahun 2018 menunjukkan Provinsi NTB sudah masuk kategori Baik, dengan nilai Indeks SPBE sebesar 2.95, namun jika kita memperhatikan rincian hasil penilaian pada setiap Domain dan Aspek Penilaian, dari tiga domain yang dinilai yaitu Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE, Provinsi NTB masih belum optimal pada Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola. Intinya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi NTB masih belum berada pada kondisi ideal seperti yang diharapkan dan perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau pengembangan sesuai dengan arahan dan standar yang telah ditetapkan.

Dalam kebijakan e-Government yang telah dikeluarkan, pemerintah telah menetapkan langkah-langkah pelaksanaan pengembangan e-Government agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Salah satu langkah penting yang disebutkan adalah bahwa setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana Strategis Pengembangan e-Government di lingkungannya masing-masing. Rencana Strategis itu dengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan e-Government yang ingin dicapai; kondisi yang dimiliki pada saat ini; strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan; kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia; serta rencana investasi yang diperlukan. Keberadaan sebuah rencana strategis atau rencana induk pengembangan e-Government akan memberikan dasar dan arah bagi pengembangan e-Government di setiap instansi pemerintah. e-Government harus direncanakan dengan matang, menyeluruh, dan berkelanjutan sehingga dapat berhasil dengan baik, selaras dengan rencana strategis institusi, mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, dan anggaran atau investasi yang telah dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

## 1.2 Maksud Dan Tujuan

Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah (SPBE) Provinsi NTB dimaksudkan untuk memberikan kerangka dasar, arah dan panduan dalam pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Provinsi NTB agar selaras dengan kebijakan SPBE Nasional dan strategi pembangunan Provinsi NTB, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan layanan publik serta mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari keberadaan Rencana Induk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Provinsi NTB adalah :

1. Meningkatkan kepedulian (*awarenes*), komunikasi, dan komitmen di tingkat pimpinan untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai bagian dari reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Provinsi NTB yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTB yang komprehensif dan terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
4. Memastikan pelaksanaan berbagai investasi di bidang sistem dan teknologi informasi secara lebih efektif dan efisien serta meminimalisir resiko kegagalan proyek-proyek sistem dan teknologi informasi.

## 1.3 Peraturan Perundang-undangan Terkait

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/ 11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kongkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara barat meliputi beberapa hal pokok, yaitu :

1. Pemahaman dasar kondisi SPBE Pemerintah Provinsi NTB, yang meliputi kondisi saat ini beserta permasalahannya dan kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang.
2. Perencanaan strategis yang meliputi visi, misi, arah kebijakan, strategi, beserta program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan.
3. Peta Rencana yang menjelaskan strategi pentahapan beserta program dan kegiatannya, sebagai penjabaran dari perencanaan strategis agar mencapai tujuan yang diharapkan dan mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
4. Arsitektur SPBE yang mendeskripsikan kerangka dasar model integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

## **BAB II**

### **KERANGKA PEMIKIRAN DASAR**

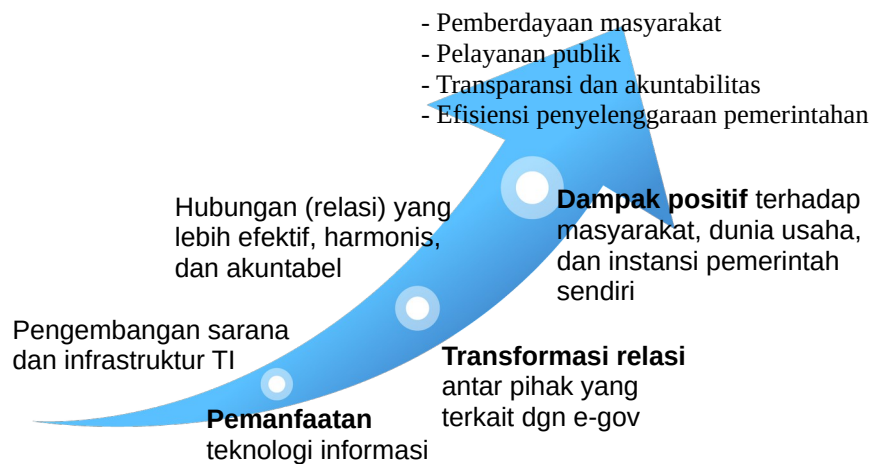
Kerangka pemikiran akan membangun dasar pemahaman tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), atau yang sebelumnya dikenal dengan istilah e-government. Diperlukan penjelasan tentang beberapa konsep dasar SPBE dan metodologi dalam penyusunan Rencana Induk SPBE.

#### **2.1 Pengertian SPBE**

Istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau sering disingkat menjadi SPBE, merupakan istilah baru yang diperkenalkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebelumnya istilah yang digunakan untuk mewakili pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah e-government, sebagaimana banyak disebut dalam literatur ilmiah.

Elektronik Government atau populer disingkat menjadi e-Government didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai *“government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency”*. Dari definisi tersebut dapat dimengerti beberapa prinsip umum yang menegaskan keberadaan penyelenggaraan e-government dari suatu lembaga pemerintah, yaitu :

1. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh suatu lembaga pemerintahan. Ini menjadi dasar bagi lembaga pemerintah untuk melakukan pengembangan sarana dan infrastruktur TIK.
2. Terjadinya suatu proses transformasi hubungan dengan masyarakat, sektor private, dan instansi pemerintah lainnya. Artinya diharapkan adanya perubahan hubungan yang lebih baik, efektif, harmonis, dan akuntabel.
3. Tujuan akhir yang diharapkan adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, perbaikan layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inilah sesungguhnya dampak positif dari penyelenggaraan e-government terhadap masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah itu sendiri.



Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mulailah diperkenalkan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pengganti istilah e-government. Dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 nomor 1 disebutkan yang dimaksud Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam bagian menimbang disebutkan bahwa Sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya

## 2.2 Unsur-unsur SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres 95 Tahun 2018 terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait, yaitu :

1. Rencana Induk SPBE Nasional - dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.
2. Arsitektur SPBE - kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
3. Peta Rencana SPBE - dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
4. Rencana dan Anggaran SPBE - disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah, berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
5. Proses Bisnis - sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
6. Data dan Informasi - mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

7. Infrastruktur SPBE - semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
8. Aplikasi SPBE - satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Terdiri atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dikelola dibangun, dikembangkan, digunakan, dan oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah
9. Keamanan SPBE - pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE, mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
10. Layanan SPBE - terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **2.3 Manajemen SPBE**

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE meliputi:

1. manajemen risiko - bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE, dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pemantauan, dan pengendalian, evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
2. manajemen keamanan informasi - bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi, dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
3. manajemen data - bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional, dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
4. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi - bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE, dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

5. manajemen sumber daya manusia - bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE, dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE, memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
6. manajemen pengetahuan - bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE, dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
7. manajemen perubahan - bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE, dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
8. manajemen Layanan SPBE - bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE, dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

## **2.4 Evaluasi SPBE**

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kementerian PANRB telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan menteri ini menjadi rujukan bagi setiap instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan evaluasi atau penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Instansi Pusat maupun Daerah.

### **2.4.1 Maksud dan Tujuan**

Pedoman evaluasi SPBE dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi evaluator internal dan evaluator eksternal dalam:

1. Memahami tujuan evaluasi serta penetapan ruang lingkup penilaian pelaksanaan SPBE;
2. Memahami metodologi penilaian pelaksanaan SPBE;
3. Memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses evaluasi;
4. Memahami mekanisme pelaporan atas penilaian pelaksanaan SPBE.

Tujuan dilakukan evaluasi SPBE adalah :

1. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
3. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



## 2.4.2 Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1. Perencanaan, yaitu mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi.
2. Pelaksanaan, yaitu melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan.
3. Pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.

## 2.4.3 Metodologi

### a. Konsep Tingkat Kematangan SPBE

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Metode tingkat kematangan pada evaluasi SPBE dikembangkan berdasarkan model-model tingkat kematangan yang telah dipraktikkan secara luas, yaitu CMM/CMMI (Capability Maturity Model/CMM Integration) dan E-Government Maturity Models

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi. Setiap tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah.

### b. Struktur Penilaian

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator. Domain, aspek, dan indikator dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Domain, Aspek, dan Indikator Penilaian

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Indikator 3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE
Indikator 8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas
Indikator 9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
Indikator 11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
Indikator 14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik
Indikator 15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System
Indikator 17	Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah
Domain 2	Tata Kelola SPBE
Aspek 3	Kelembagaan
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 4	Strategi dan Perencanaan
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK
Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Domain 3	Layanan SPBE
Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31	Layanan Pengadaan

Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik
Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 34	Layanan Whistle Blowing System
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah

c. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tingkat (level)	Karakteristik
1 – Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
2 – Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
3 - Terstandardisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi oleh semua unit organisasi terkait. Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
4 – Terintegrasi dan Terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif. Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
5 – Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

d. Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi SPBE

Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tingkat	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 – Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
4 – Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

e. Penilaian Tingkat Kematangan dan Bobot

Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang berbeda. Domain layanan SPBE diberikan nilai bobot 55%, domain tata kelola SPBE diberi nilai bobot 28%, dan domain kebijakan internal SPBE diberi nilai bobot 17%. Demikian pula, setiap aspek dari sebuah domain diberikan nilai bobot yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 4. Sedangkan nilai bobot setiap indikator pada sebuah aspek dapat dihitung dari nilai bobot aspek dibagi dengan jumlah indikator pada aspek tersebut.

Tabel 4 Bobot Domain dan Aspek

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot (%)
Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE	17	17
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	7	28
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12
Domain 3 - Layanan SPBE	11	55
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20

#### f. Nilai Indeks

Nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Nilai Indeks Aspek adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu. Nilai Indeks Aspek merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot relatif indikator terhadap bobot aspek tersebut.
2. Nilai Indeks Domain adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu. Nilai Indeks Domain merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Aspek dan bobot relatif aspek terhadap bobot domain tersebut.

3. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 5.

Tabel 5 Predikat Indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

## BAB III

### KONDISI SAAT INI

#### 3.1 Gambaran Umum Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis Provinsi NTB terletak di antara 115°46' – 119°5' Bujur Timur dan 8°10' – 9°5' Lintang Selatan, di sebelah timur dibatasi oleh Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebelah barat terdapat Selat Lombok dan Provinsi Bali, sebelah utara berhadapan dengan Laut Jawa dan Laut Florest, dan sebelah selatan berhadapan dengan Samudra Hindia. Provinsi NTB memiliki 2 pulau besar, yaitu Pulau Lombok (4.738,70 Km<sup>2</sup>) dan Pulau Sumbawa (15.414,5 Km<sup>2</sup>), serta dikelilingi 378 pulau kecil, dengan total luas wilayah mencapai 49.312, 19 Km<sup>2</sup>.



**Gambar 3.1** Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari sisi administratif, Provinsi NTB terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah wilayah kecamatan sebanyak 116 dan 1.146 wilayah desa/ kelurahan. Data rincian dari keseluruhan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1** Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Lombok Barat	10	122	1.053,92
2	Lombok Tengah	12	139	1.208,40
3	Lombok Timur	20	254	1.605,55
4	Lombok Utara	5	33	809,53
5	Sumbawa	24	166	6,643,98
6	Dompu	8	81	2.324,60
7	Bima	18	198	4.389,40
8	Sumbawa Barat	8	65	1.849,02
9	Kota Mataram	6	50	61,30
10	Kota Bima	5	38	207,50
<b>Jumlah</b>		<b>116</b>	<b>1.146</b>	<b>20.153,15</b>

Jumlah penduduk Provinsi NTB menurut hasil Survey Sosial Ekonomi tahun 2017 sebanyak 4.955.578 jiwa, dengan rincian penduduk Laki-laki sebanyak 2.405.080 jiwa dan perempuan sebanyak 2.550.498 jiwa. Sebaran penduduknya tergolong tidak merata karena lebih dari 70% berdomisili di

Pulau Lombok (3.474.274) dan selebihnya berada di Pulau Sumbawa (1.481.331), dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kota Mataram dan terendah berada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB, dari berbagai komponen yang membentuknya, selama lima tahun terakhir, dari tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2** Perkembangan Indikator IPM Provinsi NTB Tahun 2013-2017

NO.	Komponen IPM	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Angka Harapan Hidup (Tahun)</b>	64,7	64,9	65,4	65,5	65,6
2	<b>Indeks Pendidikan:</b>					
	a. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,5	12,7	13	13,2	13,5
	b. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,54	6,67	6,71	6,79	6,9
3	<b>Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)</b>	8,95	8,99	9,24	9,58	9,88
	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>63,8</b>	<b>64,3</b>	<b>65,2</b>	<b>65,8</b>	<b>66,6</b>

Sumber: \* angka sementara BPS Provinsi NTB 2017

### 3.2 Lingkungan Organisasi

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah tahun 2018, Provinsi NTB saat ini dipimpin oleh Dr. H. Zulkieflimasyah selaku Gubernur, dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah selaku Wakil Gubernur. Beliau berdua akan memimpin Provinsi NTB untuk periode kepemimpinan tahun 2018 – 2023.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016, perangkat daerah yang telah dibentuk terdiri dari unsur Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Rincian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 48, 49, 50, 51, dan 52 Tahun 2016, adalah sebagai berikut.

#### A. Staff Ahli Gubernur

Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam pelaksanaan tugasnya secara Administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Terdapat 3 Staf Ahli Gubernur yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan

#### B. Sekretariat Daerah (Setda)

Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan:
  - 1. Biro Pemerintahan
  - 2. Biro Hukum
  - 3. Biro Kesejahteraan Rakyat
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan , membawahi dan mengkoordinasikan:
  - 1. Biro Administrasi Perekonomian
  - 2. Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
  - 3. Biro Administrasi Kerjasama
- d. Asisten Administrasi Administrasi dan Umum, membawahi dan mengkoordinasikan:
  - 1. Biro Organisasi
  - 2. Biro Umum
  - 3. Biro Humas dan Protokol

### **C. Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD, terdiri dari Sekretaris DPRD, 4 (empat) bagian. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- c. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat.
- d. Bagian Keuangan.

### **D. Inspektorat Daerah**

Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi, terdiri dari :

- 1. Inspektur
- 2. Sekretariat
- 3. Inspektur Pembantu I
- 4. Inspektur Pembantu II
- 5. Inspektur Pembantu III
- 6. Inspektur Pembantu Khusus

### **D. Dinas Daerah**

- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Dinas Kesehatan
- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Dinas Perumahan dan Pemukiman
- 5. Dinas Sosial
- 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Ketahanan Pangan
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
13. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Pemuda dan Olahraga
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Dinas Kelautan dan Perikanan
18. Dinas Pariwisata
19. Dinas Pertanian dan Perkebunan
20. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Dinas Perdagangan
23. Dinas Perindustrian
24. Satuan Polisi Pamong Praja
25. Rumah Sakit Umum Daerah
26. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
27. Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir Sumbawa

#### **E. Badan Daerah**

1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Kepegawaian Daerah
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Badan Penghubung

### **3.2 Kondisi Implementasi SPBE**

#### **3.2.1 Tata Kelola**

Untuk mengatur tata kelola SPBE, Pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik.

### **a. Kelembagaan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik, Penyelenggaraan e-Government di lingkup Pemerintah Provinsi NTB dilaksanakan oleh :

1. Government Chief Information Officer (GCIO) Provinsi - Telah ditetapkan Sekretaris Daerah sebagai GCIO Provinsi NTB berdasarkan SK Gubernur Nomor : 049 – 367 Tahun 2018
2. Komite e-Government - Telah ditetapkan Komite e-Government Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan SK Gubernur Nomor : 049-366 Tahun 2018
3. Pengelola e-Government - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Pengelola e-Government Pemerintah Provinsi NTB
4. Penyelenggara Sistem Elektronik - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki dan menyelenggarakan Sistem Elektronik

Pemasalahan :

Peran dan Fungsi GCIO dan Komite e-Government belum berjalan dengan optimal karena relatif baru dibentuk. Ditetapkan pada pertengahan Tahun 2018 dan baru satu kali mengadakan rapat koordinasi untuk sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan.

### **b. Sumber Daya Manusia (SDM) TIK**

Sumber Daya Manusia Bidang TIK terdiri dari:

1. Pejabat struktural yang membidangi TIK;
2. Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
3. Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang TIK; dan
4. Aparatur Sipil Negara yang secara otodidak memiliki keahlian dan keterampilan di bidang TIK.
5. Tenaga Pendukung Teknis Bidang TIK Non ASN (Tenaga Kontrak)

Khusus di Dinas Kominfotik, Pejabat Struktural yang membidangi TIK terdiri dari

1. Kabid Pengelolaan TIK (latar belakang pendidikan non TIK)
2. Kasi Infrastruktur TIK (latar belakang pendidikan non TIK)
3. Kasi Aplikasi TIK (latar belakang pendidikan non TIK )
4. Kasi Tata Kelola TIK (latar belakang pendidikan non TIK )

Pejabat Fungsional Pranata Komputer

Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang terdata di Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 38 orang, terdistribusi di beberapa OPD. Dinas Kominfotik hanya mendapatkan alokasi 5 orang Fungsional Pranata Komputer

Tenaga Pendukung Teknis Bidang TIK

Tenaga pendukung teknis bidang TIK adalah tenaga ahli bidang TIK non ASN yang direkrut untuk mendukung pengembangan TIK di Perangkat Daerah. Saat ini sudah ditetapkan standar gaji untuk Tenaga Pendukung Teknis Bidang TIK dalam standar harga barang dan Jasa Pemprov NTB Tahun 2019

Beberapa Perangkat Daerah mengadakan Tenaga Pendukung Teknis Bidang TIK dengan alasan kebutuhan masing-masing. Dinas Kominfo sendiri memiliki 7 orang Tenaga Pendukung Teknis Bidang TIK non ASN

#### Permasalahan

1. Pejabat struktural yang membidangi TIK di Dinas Kominfo kurang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di Bidang TIK untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.
2. Jumlah tenaga fungsional Pranata Komputer di Dinas Kominfo belum ideal jika memperhatikan peran dan fungsi Dinas Kominfo selaku Pengelola e-Government Pemerintah Provinsi NTB yang meliputi seluruh OPD
3. Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang berada di OPD selain Dinas Kominfo, banyak yang penempatan dan penugasannya tidak sesuai dengan skill keahlian yang mendukung peningkatan karir fungsionalnya.
4. Standar rekrutmen dan model pemanfaatan Tenaga Pendukung Teknis Bidang TIK non PNS di luar Dinas Kominfo selama ini tidak terverifikasi dan terevaluasi.

#### c. Perencanaan

Hingga saat ini Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki Rencana Induk Pengembangan e-Government untuk periode 2015 – 2019, ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2015. Sejalan dengan Pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur Periode Tahun 2019 – 2023, yang dilanjutkan dengan penetapan RPJMD periode 2019 – 2023, Dinas Kominfo akan menyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk periode 2019 – 2023.

#### Permasalahan :

- Implementasi Rencana Induk Pengembangan e-Government tidak dimonitoring dan evaluasi secara baik. Selama 5 tahun periode pelaksanaan baru satu kali diadakan review dan evaluasi di akhir tahun 2018.
- Pemerintah Provinsi NTB tidak memiliki rencana implementasi sebagai penjabaran dari rencana induk yang idealnya dibuat setiap tahun.

#### d. Penganggaran

Rencana Anggaran TIK terdapat di setiap OPD dengan jumlah yang beragam tergantung Program dan Kegiatan TIK yang ada di OPD. Dinas Kominfo memiliki anggaran TIK rata-rata

sekitar 2 Milyar untuk pelaksanaan Program Kegiatan yang meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan Aplikasi dan Penguatan Tata Kelola TIK

Permasalahan :

1. Belum ada Perencanaan Anggaran TIK yang terkonsolidasi dan terintegrasi dengan baik untuk mengurangi inefisiensi dalam belanja TIK.
2. Beberapa masalah yang dapat timbul :
  - Adanya anggaran kegiatan TIK yang sama dari sisi fungsinya di beberapa OPD
  - Adanya anggaran kegiatan TIK yang tidak sesuai dengan tupoksi OPD yang bersangkutan
  - Nilai anggaran yang diajukan tidak wajar karena ketidakpahaman dari sisi teknis TIK

### 3.2.2 Infrastruktur

Pada Peraturan Daerah No.3 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik, ditetapkan lima Infrastruktur Dasar pendukung penyelenggaraan e-Government di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu :

- Jaringan Intra Perangkat Daerah (Intra Pemerintah);
- Pusat Data Elektronik Terpadu (Data Center)
- Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center)
- Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (GSB)
- Sistem Keamanan Informasi

#### a. Data Center dan Data Recovery Center

Pusat Data Elektronik berfungsi untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/atau sistem elektronik e-Government yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan public. Data Center Pemerintah Provinsi NTB dikelola oleh Dinas Kominfotik dan berada pada ruangan dengan ukuran kurang lebih 4m x 3m. Data Center Pemprov NTB hingga kini berisikan :

- 14 server fisik, yaitu : 8 server kominfo, 1 server PU, 1 server Bappeda, 1 server DPMPTSP, 1 Server Dikbud, 1 Server Dishub, 1 Server Diskes
- 46 server virtual,
- Perangkat Jaringan : 6 switch, 5 modem, 2 monitor, 2 UPS 10Kva, 3 firewall, 2 router,
- Akses Internet : 2 jalur internet dedicated dengan ISP yang berbeda,
- Perangkat Pendukung : Genset dan AC
- Rack server : 2 buah

Terdapat beberapa layanan data center Dinas Kominfotik yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah, yaitu :

- Hosting aplikasi/website
- Virtual private server (VPS)
- Email (mail.ntbprov.go.id)

- Cloude Storage
- Colocation Server

Permasalahan :

1. Gedung, perangkat dan fasilitas pendukung data center masih belum memenuhi standar data center yang ideal. Dinas Kominfotik mempunyai target untuk memenuhi standar data center Tier II
2. Belum semua perangkat daerah memanfaatkan layanan data center Dinas Kominfotik, dengan berbagai alasan

#### b. Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center)

Pusat pemulihan bencana merupakan data center kedua yang berfungsi menggantikan data center utama ketika mengalami suatu bencana/kegagalan dalam melakukan pelayanan. Sehingga data pemerintahan dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat tetap dapat terjaga keberlangsungannya tanpa mengalami kendala yang berarti.

Saat ini pemerintah provinsi NTB belum memiliki pusat pemulihan bencana. Solusi pengamanan data dan sistem elektronik saat ini melalui penyediaan server dan perangkat backup server yang berada di lokasi yang sama dengan Data Center. Dinas Kominfotik berencana akan menggunakan layanan Cloude Server pihak ketiga sebagai server pusat pemulihan bencana.

Permasalahan

Belum tersedia anggaran yang memadai untuk menyediakan fasilitas pusat pemulihan bencana yang ideal

#### c. Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah merupakan suatu bentuk Jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup dan lebih aman yang menghubungkan antar perangkat daerah, untuk memudahkan proses integrasi dan pertukaran data antar aplikasi/sistem informasi. Pemerintah Provinsi NTB sudah mulai membangun jaringan intra pemerintah, yang sementara baru menghubungkan 10 perangkat daerah

Permasalahan :

Pemanfaatan jaringan intra pemerintah oleh opd belum optimal, untuk aplikasi internal yang strategis semestinya diakses dengan menggunakan jaringan intra pemerintah

Karena keterbatasan anggaran, baru 10 perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah, masih ada 36 perangkat daerah yang belum terhubung

#### d. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Sistem penghubung layanan pemerintah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan atau mengintegrasikan beberapa aplikasi layanan pemerintah yang sudah ada. Sistem

ini memungkinkan terjadinya berbagi pakai data antara sistem layanan pemerintah yang berbeda. Dinas kominfotik sudah mengimplementasikan dan mengembangkan suatu aplikasi sistem penghubung layanan pemerintah yang telah disediakan oleh kementrian komunikasi dan informatika yang bernama siMantra. Sistem penghubung layanan pemerintah ini akan dikombinasikan dengan Jaringan intra pemerintah untuk dapat menghubungkan layanan pemerintah yang bersifat offline dan online, sehingga akan sangat membantu terbentuknya data warehouse yang akan digunakan pada NTB satu data.

Saat ini sistem penghubung layanan pemerintah sudah digunakan oleh beberapa OPD. Diantaranya membantu menghubungkan Aplikasi Sistem Absensi online, e-retribusi, simda, dan e-budgeting biro umum.

Permasalahan :

Sistem Penghubung layanan pemerintah belum banyak digunakan untuk keperluan integrasi data antar aplikasi OPD disebabkan karena :

- Pengembangan aplikasi yang dilakukan tanpa koordinasi dengan Dinas Kominfotik sehingga tidak terkontrol dalam kebutuhan integrasinya.
- Kurangnya sosialisasi pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintahan di tingkat pengembang aplikasi OPD

### **3.2.3 Aplikasi**

Dari hasil kegiatan registrasi aplikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfotik terhadap OPD lingkup Pemprov NTB pada tahun 2018, diketahui terdapat 112 Aplikasi yang telah dikembangkan oleh 43 OPD. Jika dikelompokkan berdasarkan fungsinya, 112 sistem elektronik tersebut terdiri dari :

- Situs Web : 47
- Layanan Publik : 36
- Administrasi dan Manajemen Umum : 9
- Administrasi Legislasi : 1
- Manajemen Pembangunan : 9
- Manajemen Keuangan : 4
- Manajemen Kepegawaian : 4

Untuk mewujudkan penyelenggaraan aplikasi yang handal, terintegrasi, dan berkesinambungan, Pemerintah provinsi NTB telah mengeluarkan kebijakan tentang koordinasi pengembangan aplikasi. Bentuk kebijakan tersebut berupa :

1. Surat Edaran Gubernur Nomor : 550/171/DISKOMINFOTIK, Tanggal 17 Juli 2017 Tentang Standar Koordinasi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah
2. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 480/10/ 3/ KOMINFOTIK, Perihal Koordinasi Pengembangan e-Government.

Inti dari dua kebijakan ini adalah :

- meminta kepada OPD yang akan mengembangkan aplikasi agar berkoordinasi untuk mendapatkan rekomendasi dalam pengembangan pada dua tahap, yaitu pada tahap perencanaan dan tahap pra implementasi.
- Menempatkan aplikasi online yang mereka miliki di Server Hosting milik Dinas Kominfotik
- Kebijakan ini dikeluarkan untuk mencegah adanya pengembangan aplikasi sejenis yang pernah ada (redudansi)
- Memastikan kehandalan dari sisi teknis, dan kepatuhan dari sisi regulasi
- Mencegah adanya penganggaran aplikasi yang tidak wajar dari sisi nilai anggaran
- Memastikan aplikasi yang dibangun mendukung pengembangan berkelanjutan dan interoperabilitas antar aplikasi

Permasalahan :

- Masih banyak aplikasi yang diadakan/ dikembangkan oleh OPD tanpa koordinasi dengan Dinas Kominfotik, sehingga tidak terdata dan terevaluasi
- Masih ada aplikasi online yang ditempatkan tidak di sever hosting Dinas Kominfotik

### 3.3 Hasil Evaluasi SPBE

Pemerintah Provinsi NTB telah mengikuti rangkaian kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rangkaian Kegiatan Evaluasi SPBE meliputi Sosialisasi, Evaluasi Mandiri, Wawancara dan Observasi Lapangan, yang diselenggarakan mulai Maret hingga September 2018, sesuai jadwal yang ditetapkan. Hasil evaluasi telah diumumkan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 28 Maret 2019 pada Acara Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018.

Dari hasil evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi NTB diketahui nilai index SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 2.95, masuk dalam kategori Baik ( 2,6 – < 3,5 ). Rincian nilai index SPBE berdasarkan Domain dan Aspek adalah :

Index	Nilai
<b>SPBE</b>	<b>2,95</b>
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>2,71</b>
Kebijakan Tata Kelola SPBE	3,00
Kebijakan Layanan SPBE	2,50
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2,57</b>
Kelembagaan	2,00
Strategi dan Perencanaan	3,00
TIK	2,67

<b>Domain Layanan SPBE</b>	3,21
Administrasi Pemerintahan	3,43
Pelayanan Publik	2,83

Perolehan nilai tingkat kematangan seluruh indikator SPBE adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Nilai Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	3
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	2
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	3
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	3
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	3
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	3
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	4
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	1
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	1
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	3
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	3
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	3
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	4
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	3
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	1
17	Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah	3
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	2
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	2
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	3
21	Anggaran dan Belanja TIK	3
22	Pengoperasian Pusat Data	3
23	Integrasi Sistem Aplikasi	2
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	3
25	Layanan Naskah Dinas	2
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	3
27	Layanan Manajemen Perencanaan	4
28	Layanan Manajemen Penganggaran	4
29	Layanan Manajemen Keuangan	4
30	Layanan Manajemen Kinerja	3
31	Layanan Pengadaan	4
32	Layanan Pengaduan Publik	4
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3
34	Layanan Whistle Blowing System	1



35-1	Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Perizinan Terpadu	3
35-2	Kampung Media	3
35-3	e-Samsat	3

Nilai index SPBE Pemerintah Provinsi NTB sebesar 2,95 berada pada predikat Baik, berada di level tengah. Jika ditinjau dari sisi tingkat kematangan, pada kapabilitas proses berada pada fase “Sudah Terkelola” namun belum sepenuhnya “Terstandarisasi”, maknanya bahwa pengaturan SPBE telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian besar kebutuhan di instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi namun belum sepenuhnya terstandarisasi.

Pada kapabilitas fungsi teknis, SPBE Pemerintah Provinsi NTB berada pada fase “Interaksi” menuju “Transaksi” yang artinya bahwa sebagian besar Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah, dan sebagian kecilnya dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

### **Kekuatan dan Kelemahan**

Jika memperhatikan rincian nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan domain dan aspeknya, maka diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada Domain Layanan SPBE, sebesar 3,21. Domain ini meliputi aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. Ini berkaitan dengan berbagai jenis Layanan berbasis TIK yang telah diselenggarakan baik untuk kepentingan internal Administrasi Pemerintahan, maupun untuk kepentingan layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung. Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki cukup banyak aplikasi layanan namun penyelenggaraannya masih belum dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala, serta belum terdokumentasi dengan baik.

Domain Kebijakan SPBE berada di urutan kedua dengan nilai indeks sebesar 2,71. Domain ini terdiri dari aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE dan aspek Kebijakan Layanan SPBE. Sebagian besar kebijakan internal terkait Tata Kelola SPBE yang dipersyaratkan dalam penilaian sudah dapat dipenuhi, namun belum ada kegiatan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut secara berkala dan didokumentasikan dengan baik. Khusus untuk kebijakan layanan SPBE, Pemerintah Provinsi NTB belum menetapkan kebijakan layanan Naskah Dinas, Manajemen Kepegawaian dan Whistle Blowing System

Nilai indeks terendah terdapat pada Domain Tata Kelola yang memiliki nilai indeks sebesar 2,57. Domain ini terdiri dari aspek Kelembagaan, Strategi & Perencanaan, dan TIK. Dari sisi kelembagaan, sudah terbentuk Tim Pengarah SPBE namun peran dan fungsinya belum berjalan dengan optimal. Alur Kerja atau Proses Bisnis Terintegrasi belum dirumuskan secara menyeluruh. Pada aspek Strategi dan Perencanaan, pelaksanaan Rencana induk SPBE belum dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, sementara Perencanaan dan Penanganan TIK belum terkoordinasi dan dievaluasi dengan baik. Dari aspek TIK, layanan pusat data belum dipantau, dievaluasi dan diperbaiki secara rutin, kemudian proses integrasi Sistem Aplikasi belum diterapkan di semua Unit Kerja

Secara umum dari seluruh domain penilaian SPBE, penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi NTB masih lemah dari sisi integrasi, pemantauan, evaluasi dan dokumentasi yang

berkelanjutan. Kemudian secara khusus Perbaikan pada Domain Tata Kelola harus menjadi prioritas, karena mendapat nilai terendah dari keseluruhan domain penilaian.

Penjelasan lebih rinci tentang kekuatan dan kelemahan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan hasil evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB adalah sebagai berikut :

#### **A. Kebijakan Tata Kelola**

Kekuatan : Pemprov NTB sudah mempunyai banyak kebijakan internal terkait Tata Kelola SPBE. Kebijakan Tim Pengarah SPBE dituangkan dalam SK Gubernur NTB Nomor Tahun 2018 Tentang Komite e-Government Pemerintah Provinsi NTB. Sudah ada kebijakan internal untuk standardisasi penyusunan proses bisnis (alur kerja).

Rencana Induk SPBE sudah disahkan dalam Pergub Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemprov NTB.

Perencanaan dan Penganggaran TIK diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik, Pasal 16. Kebijakan tentang Layanan Pengoperasian Pusat Data dijelaskan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Pasal 19 yang menjelaskan keberadaan Pusat Data Elektronik Terpadu dan SK Sekretaris Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data dan Ruang Server di Lingkup Pemprov NTB. Kebijakan tentang Integrasi Sistem dan Aplikasi Umum Berbagi Pakai juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Secara keseluruhan, Pemprov NTB sudah mempunyai semua kebijakan terkait Tata Kelola SPBE.

Kelemahan : Semua kebijakan internal terkait Tata Kelola SPBE masih belum dinilai dan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi ini harus terdokumentasi dengan baik dan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru.

#### **B. Kebijakan Layanan**

Kekuatan :

Pemprov NTB sudah mempunyai 7 dari 10 kebijakan Layanan SPBE yaitu : Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, Manajemen Keuangan, Manajemen Kinerja, Layanan Pengadaan, Pengaduan Publik, Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Layanan Publik

Kelemahan :

Pemprov NTB masih belum mempunyai kebijakan internal terkait layanan Naskah Dinas, Manajemen Kepegawaian dan Whistle Blowing System

### **C. Kelembagaan**

Kekuatan :

Tim Pengarah SPBE sudah dilegalisasi dalam bentuk SK Gubernur dan sudah melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya. Pemprov NTB sudah mempunyai alur kerja tau proses bisnis yang terintegrasi dan sudah diterapkan di sebagian unit kerja

Kelemahan :

Kinerja Tim Pengarah SPBE sebaiknya selalu dipantau dan dievaluasi. Alur kerja atau proses bisnis terintegrasi saat ini masih belum diterapkan di semua Unit Kerja

### **D. Strategi dan Perencanaan**

Kekuatan :

Pemprov NTB sudah mempunyai Rencana Induk SPBE yang diberi nama Dokumen Rencana Induk Pengembangan E-Government Pemprov NTB dan telah ditetapkan melalui Pergub Nomor 4 Tahun 2015. Dokumen ini mencakup semua muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE. Setiap tahun Pemprov selalu mempunyai anggaran khusus untuk belanja TIK, baik meliputi pengadaan perangkat keras, pengembangan infrastruktur, pengembangan aplikasi maupun pemeliharaan. Perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE tertuang pada DPA tahunan. Seluruh perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK

Kelemahan :

Pelaksanaan Rencana Induk SPBE masih belum dipantau dan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan Road Map. Begitu juga perencanaan dan penganggaran TIK perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hasil proses evaluasi dan rekomendasi perbaikan harus terdokumentasi dengan baik.

### **E. Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Kekuatan :

Pemprov NTB sudah mempunyai layanan pusat data (data center) dan sudah mempunyai prosedur pengoperasian baku layanan pusat data. Layanan Pusat Data ini sudah dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja.

Pemprov NTB sudah mengembangkan aplikasi SiMantra yang merupakan sistem penghubung layanan pemerintah dan sudah digunakan di sebagian Unit Kerja. SiMantra menyediakan modul layanan untuk mengintegrasikan Aplikasi yang dibutuhkan.

Kelemahan :

Kinerja layanan pusat data (data center) masih belum dipantau, dievaluasi dan diperbaiki secara rutin dan berkesinambungan.

Integrasi Sistem Aplikasi masih belum diterapkan di semua Unit Kerja.

## **F. Layanan Administrasi Pemerintahan**

Kekuatan :

Ada banyak layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah berjalan dengan baik. Layanan Manajemen Kepegawaian sudah diterapkan dan terhubung ke BKN. Sistem Manajemen Perencanaan didukung oleh aplikasi e-Planning yang dikelola oleh BPPEDA. Untuk manajemen Perencanaan, aplikasi ePlanning memiliki modul RPJMD, RENJA, POKIR, MUSREMBANG. Modul eplanning sudah terintegrasi dengan e-budgeting dan SIMDA Keuangan.

Sistem Manajemen Kinerja yang telah digunakan berupa Aplikasi e-Sakip untuk mengelola data yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review dan Evaluasi Kinerja.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga sudah dijalankan dengan baik dan terhubung langsung ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

Kelemahan :

Semua layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik masih belum dievaluasi dan diperbaiki secara berkala. Proses evaluasi dan perbaikan layanan harus terdokumentasi dengan baik.

## **G. Pelayanan Publik**

Kekuatan :

Sistem Pengaduan Layanan Publik yang digunakan oleh Pemprov NTB ada 2, yaitu Aplikasi Laporan SP4N yang terhubung ke Kementerian PANRB dan Staf Kepresidenan dan SMS Center Pemprov NTB. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sudah diterapkan dan dapat diakses melalui situs <http://jdih.ntbprov.go.id>.

Ada banyak layanan publik yang sudah dikembangkan, yang pertama adalah Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Perizinan Terpadu (SIPEPADU) yang sudah diterapkan sejak tahun 2017. Layanan publik kedua adalah Kampung Media yang merupakan portal berbagi informasi dan jurnalisme warga yang dibina oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pada tahun 2014 Kampung Media mendapat penghargaan 9 Top Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB. Layanan publik ketiga adalah Pelayanan Samsat secara elektronik

Kelemahan :

Belum ada layanan Whistle Blowing System (WBS) untuk memproses pengaduan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi

## BAB IV

### KONDISI YANG DIHARAPKAN

#### 4.1 Tuntutan Kebijakan

##### 4.1.1 Kebijakan SPBE dalam RPJMD

Pada periode Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. H. Dzulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, telah ditetapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023. Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Daerah dan Rencana Strategis Setiap Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan, agar selaras dan terpadu untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah Provinsi NTB yang dicita-citakan.

Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

- Visi : Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang  
Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :
- Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional.
  - Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
- Misi :
1. NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
  2. NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi
  3. NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah
  4. NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
  5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi
  6. NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

Setiap pernyataan misi yang disebutkan dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Tujuan yang hendak dicapai, dilanjutkan dengan penentuan sasaran dan strategi yang digunakan agar mencapai hasil yang optimal. Jika memperhatikan penjabaran misi, tujuan, dan strategi dalam RPJMD tersebut, maka kebijakan yang terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penjabaran dari Misi ke-2, yaitu “NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi”. Tujuan yang ditetapkan pada misi ke-2 ini adalah “Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel”, sedangkan salah satu sasarnya adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat”, lalu strategi yang digunakan adalah “Peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Kebijakan SPBE yang terdapat dalam RPJMD Pemprov NTB sangat selaras dengan Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada bagian Menimbang dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Nilai yang terkandung di dalam bagian menimbang ini sangat sejalan dengan strategi, sasaran, dan tujuan dari Misi ke-2 dalam RPJMD Pemprov NTB, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hubungan antara RPJMD Pemprov NTB yang berbicara Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Perpres 95 Tahun 2018 dapat dirangkum sebagai berikut :

RPJMD Pemprov NTB Tahun 2019 - 2023	Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018
Misi 2 - NTB BERSIH DAN MELAYANI	Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
Tujuan - Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	
Sasaran - Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	
Strategi - Peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	

#### 4.1.2 Kebijakan Pusat dan Daerah

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan penting dan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah, oleh karenanya pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijakan yang mendorong dan mengarahkan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Beberapa aturan dan kebijakan terkini yang perlu menjadi perhatian sekaligus menjadi dasar kebutuhan dalam pengembangan SPBE di lingkup Pemprov NTB adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden ini menjadi acuan utama setiap instansi pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi di lingkup instansi. Khusus untuk lingkup pemerintah daerah, beberapa kebijakan yang harus mendapat perhatian adalah sebagai berikut :
  - a) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
  - c) Penyusunan Rencana Anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
  - d) Penyusunan Proses Bisnis;
  - e) Pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang meliputi :
    - Pusat Data Pemerintah Daerah (dengan persyaratan tertentu);
    - Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
    - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
  - a) Pengembangan dan Penggunaan aplikasi umum dan khusus;
  - b) Penerapan Keamanan SPBE;
  - c) Penerapan Layanan SPBE yang terdiri dari Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik;
  - d) Pelaksanaan Manajemen SPBE;
  - e) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia. Peraturan presiden ini mempunyai keterkaitan dengan kebijakan pengembangan SPBE yakni pada aspek data dan informasi. Beberapa kebijakan dalam peraturan presiden ini yang berhubungan dengan pengembangan SPBE adalah :
  - a) Kebijakan tata kelola data bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah;
  - b) Penerapan standar data, metadata, dan interoperabilitas data untuk menghasilkan data yang berkualitas
  - c) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri dari empat proses, yaitu Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data. Dalam tahap Perencanaan Data dilakukan kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam penyusunan daftar data ini adalah mengacu pada arsitektur SPBE, khususnya pada domain arsitektur data dan

informasi, sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Pemerinta Provinsi NTB dalam Rencana Pebangunan Jangka Menengah 2019 – 2023 selain telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, dicanangkan pula berbagai program unggulan merupakan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bagian dari janji kampanye beliau yang akan diwujudkan. Beberapa program unggulan yang berkaitan atau mengandung potensi melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut :
  - a) Gemilang Infrastruktur Dan Tangguh Bencana, terdiri dari:
    - SI-AGA
    - Desa Tangguh Bencana
    - NTB Terkoneksi
    - Sekolah Siaga Bencana
  - b) Gemilang Birokrasi, terdiri dari:
    - eNTeBe Plan
    - SAKIP LEVEL A
    - E-Samsat
    - NTB Care
    - Research Based Policy
    - Samsat Delivery
    - NTB SDGs Centre
    - NTB Satu Data, NTB Satu Peta
    - NTB WTP
  - c) Gemilang Pendidikan
    - Literasi Digital
    - Revitalisasi Posyandu
    - Generasi Emas NTB
  - d) Gemilang Lingkungan, terdiri dari :
    - NTB Zero Waste
    - Bank Sampah
  - e) Gemilang Ekonomi, Pariwisata, Pertanian Dan Industri, terdiri dari:
    - E-Commerce
    - Science Technology Industrial Park (STIP) Inovatif
    - NTB ramah investasi
    - UMKM Bersaing
    - 99 Desa Wisata
  - f) Gemilang Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari:
    - Islamic Centre Pusat Peradaban
    - Kampung Madani



- Desa Bersinar
- Kampung Media

#### **4.2 Rekomendasi dan Kebutuhan Peningkatan Nilai SPBE**

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTB, Index SPBE menjadi indikator Program Pengembangan e-Government yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang berperan sebagai pengelola e-Government Pemerintah Provinsi NTB. Target indikator index SPBE yang hendak dicapai hingga Tahun 2023 adalah 4.2, masuk dalam predikat “Memuaskan” atau level tertinggi, namun dengan batas nilai minimal (4,2).

Dari sisi tingkat kematangan, level yang akan dicapai pada kapabilitas Proses adalah “Terintegrasi dan Terukur”, sedangkan pada Kapabilitas Fungsi Teknis berada pada level Kolaborasi. Artinya pada kapabilitas proses kondisi yang harus dipenuhi adalah segala pengaturan SPBE telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi Pemerintah, serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif. Pada aspek kapabilitas Fungsi Teknis, kondisi yang akan dicapai adalah bahwa sebagian besar layanan SPBE harus terintegrasi dengan layanan SPBE lain. Perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis dan terarah agar nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkat, memenuhi target yang telah ditetapkan. Nilai index SPBE yang meningkat menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB semakin baik.

Dalam laporan hasil Evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB telah disampaikan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Rekomendasi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dengan memperhatikan permasalahan dan kebutuhan pengembangan SPBE selama 5 tahun ke depan agar menemukan strategi yang tepat untuk mencapai target yang diharapkan. Hasil analisis rekomendasi dan kebutuhan peningkatan nilai Evaluasi ditampilkan pada Tabel berikut :

No.	Indikator	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi	Strategi
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE	Sudah ada Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE berupa : 1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik (Pasal 7); 2) Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemprov NTB, Pasal 8; 3) SK Gubernur Nomor Tahun 2018 Tentang Komite e-Government Pemerintah Provinsi NTB	Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pemerintah Daerah dan antar Instansi Pusat/Daerah	Memperbaharui/melengkapi Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Belum ada kebijakan internal yang khusus tentang proses bisnis terintegrasi	Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tersusunya proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Menyusun Kebijakan internal tentang proses bisnis terintegrasi Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Kebijakan Internal tentang rencana induk SPBE terdapat pada : 1) Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik, pasal 16; 2) Pergub No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Pemprov NTB	Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan rencana induk yang mencakup penerapan SPBE yang terpadu, tidak hanya di dalam Instansi Pemerintah Daerah, tetapi juga antar Instansi Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah	Memperbaharui/melengkapi Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Membuat Dokumen Rencana Induk SPBE yang baru diselaraskan dengan RPJMD 2019 - 2023

4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Kebijakan internal Rencana Anggaran dan Belanja TIK terdapat pada Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik, pasal 16 ayat 4	Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan terkait penyelarasan dengan rencana induk SPBE, pengendalian rencana dan anggaran TIK yang terpadu di dalam Instansi Pemerintah Daerah, dan mendukung penerapan SPBE yang terpadu tidak hanya di dalam instansi Pemerintah Daerah, tetap juga antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Memperbaharui/melengkapi Kebijakan Internal yang terkait dengan Rencana Anggaran TIK Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Kebijakan Internal berupa : 1) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik Pasal 19 yang menjelaskan keberadaan Pusat Data Elektronik Terpadu; 2) SK Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data dan Ruang Server di Lingkup Pemprov NTB	Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan pengintegrasian pusat data dengan pusat data lain atau pengaturan transisi menggunakan pusat data nasional	Memperbaharui/ melengkapi kebijakan internal tentang Pengoperasian Pusat Data Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Kebijakan Internal berupa Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik Pasal 22 dan Pasal 33 yang menjelaskan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Aplikasi; 2) Standar Operasional Prosedur Pengembangan Aplikasi	Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Memperbaharui/ melengkapi kebijakan internal tentang Integrasi Sistem Aplikasi Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Dalam Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemprov NTB, tepatnya pada sub bab 6.2.4 tentang Aplikasi e-Government Provinsi NTB,	Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan	Melengkapi/ menyusun kebijakan internal yang secara langsung mengatur penggunaan aplikasi umum berbagi pakai

		telah dipaparkan daftar aplikasi yang telah dan akan dikembangkan. Terdapat atribut SKPD yang menjelaskan SKPD pengguna atau penyelenggara. Aplikasi Umum ditandai dari SKPD pengguna/penyelenggara yang berisi seluruh SKPD, atau lebih dari satu SKPD	eksternal di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen perubahan.	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Kebijakan internal berupa : 1) Surat edaran SEKDA tentang pemanfaatan aplikasi Administrasi Perkantoran Maya (SIMAYA); 2) SOP Administrasi Perkantoran Maya (SIMAYA)	Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan naskah dinas secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Menetapkan kebijakan internal Layanan Naskah Dinas Elektronik dalam bentuk Surat Keputusan atau Peraturan Gubernur Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Kebijakan internal berupa : 1) Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara Terpadu; 2) Alur Sistem ASN Terpadu (SIMADU); 3) SOP Sistem informasi presensi elektronik terintegrasi	Kebijakan internal Layanan Manajemen Kepegawaian sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen pegawai secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Melengkapi/ memperbaharui Kebijakan internal Layanan Manajemen Kepegawaian Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Kebijakan internal baru berupa SK Gubernur Tentang Pembentukan Tim Penyusun Pengembangan Aplikasi e-Planning	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan manajemen	Menetapkan Kebijakan internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

			perencanaan dan penganggaran secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Kebijakan internal berupa : 1) SK Gubernur Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi dan Teknologi Informatika Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 2) SOP Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan; 3) Surat Edaran Kepala BPKAD No.. 900/218/BPKAD/ 2018 Tentang SIMDA Keuangan	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Menetapkan kebijakan internal yang secara khusus mengatur Layanan Manajemen Keuangan Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Kebijakan berupa SK Sekda selaku CIO Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen kinerja secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan manajemen kinerja secara elektronik antar Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Melengkapi kebijakan internal Layanan Manajemen Kinerja Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Kebijakan internal berupa : 1) Pergub No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No.. 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB; 2) SK Sekretaris Daerah Nomor 049-05 Tahun 2018 Tentang	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen perubahan	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

		<p>Penunjukan Pejabat dan Pelaksana Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB; 3) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi NTB; 4) SOP Pengoperasian Sistem LPSE</p>		
14	<p>Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik</p>	<p>Kebijakan Internal terdiri dari : 1) SK Gubernur Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi Serta Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; 2) SK Sekda NTB sebagai CIO Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan SMS Center di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 3) Dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan SMS Center; 4) Dokumen Standar Operasional Prosedur Pengaduan Layanan Publik dan Dugaan Pelanggaran Pemerintah (WBS) Melalui Aplikasi NTB Care; 5) MoU Pemprov NTB dengan Kabupaten/Kota se-NTB Tentang Kerja sama Pemanfaatan Aplikasi NTB Care; 6) PKS Pemprov NTB dengan Kabupaten/Kota se-NTB Tentang Kerja sama Pemanfaatan Aplikasi NTB Care;</p>	<p>Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan pengaduan publik secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan pengaduan publik secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</p>	<p>Melengkapi kebijakan internal Layanan Pengaduan Publik Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.</p>

15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kebijakan berupa SK Sekda selaku CIO Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Situs Web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan JDIH secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pemerintah Daerah atau integrasi antar Instansi Pemerintah Daerah atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah	Melengkapi kebijakan internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Meningkatkan bentuk kebijakan menjadi Surat Keputusan atau Peraturan Gubernur Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	WBS merupakan salah satu modul dari sistem pengaduan layanan publik NTB Care, kebijakan internalnya tertuang dalam : 1) Dokumen Standar Operasional Prosedur Pengaduan Layanan Publik dan Dugaan Pelanggarann Pemerintah (WBS) Melalui Aplikasi NTB Care; 2) MoU Pemprov NTB dengan Kabupaten/ Kota se-NTB Tentang Kerjasama Pemanfaatan Aplikasi NTB Care; 3) PKS Pemprov NTB dengan Kabupaten/Kota se-NTB Tentang Kerjasama Pemanfaatan Aplikasi NTB Care;	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan WBS secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah	Melengkapi kebijakan internal Layanan Whistle Blowing System Meningkatkan bentuk kebijakan menjadi Surat Keputusan atau Peraturan Gubernur
17	Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah	Kebijakan internal yaitu: 1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (pasal 18); 2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan; 3) Surat Keputusan Kepala	Kebijakan Internal Layanan Publik sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan publik secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan publik secara elektronik antar Instansi Pmerintah	Melengkapi kebijakan internal Layanan Publik Instansi Pemerintah

		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Perizinan Terpadu (SIPEPADU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat;	Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerinah Daerah	
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1) Telah terdapat Komite e-Government Pemprov NTB yang berfungsi sebagai TIM Pengarah SPBE; 2) Komite e-Government Pemprov NTB belum berfungsi secara optimal. Pernah melaksanakan 2 kali Rapat Koordinasi	Tim Pengarah SPBE sebaiknya melaksanakan tugas dan fungsinya secara menyeluruh sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan	Optimalisasi Rapat koordinasi Komite e-Governmt agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai kebijakan internal yang telah ditetapkan
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Pemerintah Prov NTB baru miliki Draft Peta Proses Bisnis Lingkup Pemprov NTB Sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2023	Proses bisnis sebaiknya diterapkan pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah	Membuat kebijakan dan dokumen peta proses bisnis terintegrasi lingkup Pemprov NTB, mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nonor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Pemprov NTB telah memiliki Dokume Rencana Induk Pengembangan E-Government Pemprov NTB dan telah ditetapkan melalui Pergub No. 4 Tahun 2015 Rencana Induk saat ini disusun untuk periode 2015 - 2019	Pelaksanaan peta rencana dari rencana induk SPBE sebaiknya diterapkan secara konsisten dan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala	Menyusun Rencana Induk SPBE yang baru untuk periode 2019 – 2023, sesuai dengan periode RPJMD terbaru
21	Anggaran dan Belanja TIK	Perencanaan dan penganggaran TIK saat ini dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, tidak ada Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan,	Perencanaan dan penganggaran TIK sebaiknya tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan secara terpadu, sebaiknya dapat dikendalikan oleh unit	Menyusun kebijakan yang mengatur Perencanaan dan Penganggaran TIK secara terpadu Menyusun Rencana Anggaran dan



		sehingga tidak dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi	kerja/perangkat daerah yang berfungsi sebagai pengelola TIK dan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala	Belanja TIK mengikuti periode Perencanaan dan anggaran Tahunan
22	Pengoperasian Pusat Data	Pusat data pemprov ntb berada dan dikelola oleh Dinas Kominfotik Fasilitas ruangan dan perangkat utama dan pendukung data center belum memenuhi standar Layanan data center yang diselenggarakan adalah : hosting web/aplikasi, virtual private server, colocation server, cloude repositori, email server, pemberian nama domain	Perencanaan kapasitas, pengendalian, dan pemantauan layanan dari satu atau beberapa pusat data (data center) sebaiknya dapat dilakukan secara berkala dan terpusat (manajemen tunggal)	Penyediaan gedung dan fasilitas pendukung data center yang memenuhi standar Pengadaan dan pembaharuan perangkat server dan jaringan sesuai dengan tuntutan layanan Optimalisasi tata kelola layanan data center, khususnya pada fungsi perencanaan kapasitas, pengendalian dan pemantauan layanan dari satu ata beberapa pusat data
23	Integrasi Sistem Aplikasi	Dinas Kominfotik telah menerapkan sistem penghubung layanan pemerintah dengan menggunakan aplikasi Mantra Beberapa aplikasi yang telah terintegrasi adalah : 1) aplikasi e-planning – Simda Keuangan; 2) Aplikasi Pra RKA – Simda Keuangan; 3) Aplikasi e-Retribusi – Simda Keuangan; 4) Aplikasi dashboar keuangan – Simda Keuangan – Sistem Informasi Bank NTB	Integrasi sistem aplikasi sebaiknya diterapkan secara menyeluruh berdasarkan pada arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE	Menyusun arsitektur integrasi sistem aplikasi sesuai Arsitektur dan Rencana Induk SPBE Pemprov NTB Mendorong kebijakan koordinasi dan integrasi dalam pengembangan aplikasi Fasilitasi proses integrasi aplikasi OPD melalui layanan SiMantra
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Pemprov NTB telah menggunakan beberapa aplikasi umum berbagi pakai, di antaranya : Simda Keuangan, e-Planning, LPSE, e-Sakip, e-Monev, NTB Care, Laport SP4N	Penggunaan aplikasi umum sebaiknya diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari Rencana Induk SPBE	Monitoring dan evaluasi aplikasi umum secara reguler. Fasilitasi pengembangan, implementasi dan penanganan kesalahan aplikasi umum

25	Layanan Naskah Dinas	Layanan naskah dinas menggunakan aplikasi SiMaya Cloude yang disediakan oleh Kementerian Koinfo. Aplikasi baru digunakan oleh Pemprov NTB bulan Oktober 2019, sehingga belum optimal pemanfaatannya oleh OPD	Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada penggunaan naskah dinas elektronik dilaksanakan secara otomatis seperti mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, serta sistem dapat merespon kepada pengguna terhadap mekanisme persetujuan, penyetoran tanda tangan digital dan pengiriman naskah dinas elektronik ke tujuan penerima di internal Instansi Pemerintah Daerah	Meningkatkan komitmen pimpinan OPD untuk menggunakan aplikasi SiMaya Sosialisasi dan fasilitasi pemakaian aplikasi SiMaya
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	Layanan Manajemen kepegawaian menggunakan aplikasi SiMadu dan Simpeg yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah. Terdapat juga aplikasi presensi terintegrasi Si-Sensi yang dikelola Dinas Kominfotik. Aplikasi SiMadu dan Simpeg adalah dua aplikasi yang mengelola data yang hampir mirip. Aplikasi Simadu maupun Simpeg belum diintegrasikan dengan Aplikasi SiSensi	Layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar instansi Pemerintah Daerah	Penyatuan dan pengembangan aplikasi layanan manajemen kepegawaian yang dapat diintegrasikan dengan layanan aplikasi SPBE lainnya
27	Layanan Manajemen Perencanaan	Sistem Manajemen Perencanaan didukung oleh Aplikasi e-Planning yang dikelola oleh BAPPEDA dan telah terintegrasi dengan aplikasi SIMDA keuangan. Untuk manajemen perencanaan, aplikasi ePlanning memiliki modul RPJMD, RENJA,	Layanan manajemen perencanaan kegiatan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan	Monitoring, evaluasi dan pengembangan aplikasi layanan perencanaan untuk memenuhi permintaan perubahan layanan dan kebutuhan integrasi dengan aplikasi SPBE lain

		POKIR, MUSREMBANG;	eksternal di Instansi Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan	
28	Layanan Manajemen Penganggaran	Sistem Penganggaran yang telah diimplementasikan menggunakan aplikasi e-Planning melalui modul RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), modul KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Platfon Sementara), dan modul ASB (Analisa Standar Biaya), Aplikasi E-Plening sudah terintegrasi dengan SIMDA keuangan.	Layanan manajemen penganggaran yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Insansi Pemerintah Daerah dan penerapan manajemen perubahan	Monitoring, evaluasi dan pengembangan aplikasi e-Planning untuk memenuhi permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan internal/eksternal
29	Layanan Manajemen Keuangan	Sistem Manajemen keuangan menggunakan aplikasi SIMDA KEUANGAN yang telah terintegrasi dengan Aplikasi E-Plening. Untuk monitoring progres pelaksanaan program kegiatan menggunakan aplikasi E-Monev Pemerintah Provoinsi NTB	Layanan manajemen keuangan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pemerintah Daerah dan penerapan manajemen perubahan	Monitoring, evaluasi dan pengembangan aplikasi Simda Keuangan dan e-Monev untuk memenuhi permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan internal/eksternal
30	Layanan Manajemen Kinerja	Sistem Manajemen Kinerja yang telah digunakan berupa Aplikasi e-Sakip untuk mengelola data yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviw dan Evaluasi Kinerja	Layanan manajemen kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar instansi Pemerintah Daerah	Pengembangan aplikasi agar terintegrasi dengan aplikasi layanan SPBE lain, seperti aplikasi layanan keuangan Simda dan aplikasi layanan perencanaan dan penganggaran e-Planning
31	Layanan Pengadaan	Pemprov NTB telah menggunakan	Layanan pengadaan yang terintegrasi	Monitoring, evaluasi dan

		Aplikasi LPSE Versi 4 sebagai sistem pengadaan secara elektronik dengan berbagai modul transaksi yang disediakan oleh LKPP	sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Insansi Pemerintah Daerah dan penerapan manajemen perubahan.	pengembangan aplikasi pendukung LPSE untuk memenuhi permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan internal/eksternal
32	Layanan Pengaduan Publik	Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Laport SP4N (Nasional) dan Aplikasi NTB Care (Lokal). NTB Care Telah diintegrasikan dengan Aplikasi SMS Center beserta Aplikasi Pengaduan di beberapa Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota, dan telah mengalami beberapa kali pengembangan dan peningkatan teknologi (Versi Android dan IOS).	Layanan pengaduan publik yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan	Monitoring, evaluasi dan pengembangan aplikasi NTB Care untuk memenuhi permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan internal/eksternal, dan integrasi dengan aplikasi SPBE lainnya
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Layanan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) terdapat dalam Situs Web JDIH Pemprov NTB ( <a href="http://jdih.ntbprov.go.id">jdih.ntbprov.go.id</a> ) dan telah terintegrasi dengan sistem jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).	Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Insansi Pemerintah Daerah	Monitoring, evaluasi dan pengembangan website JDIH Pemprov NTB untuk memenuhi permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan internal/eksternal
34	Layanan Whistle Blowing System	Layanan Whistle Blowing System (WBS) merupakan salah satu modul dari aplikasi pengaduan masyarakat	Layanan whistle blowing system (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada	Monitoring, evaluasi dan pengembangan modul WBS dalam aplikasi NTB Care untuk memenuhi

		“NTB Care”	layanan pengaduan yang mendukung kerahasiaan pelapor dan menerapkan mekanisme nirsangkal dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progress penyelesaian dari pengaduan tersebut.	permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan internal/eksternal, dan integrasi dengan aplikasi SPBE lainnya
35-1	Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Perizinan Terpadu	Sistem pelayanan publik Perijinan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Perizinan Terpadu (SIPEPADU) Aplikasi Si Pepadu belum terintegrasi dengan sistem Online Single Submission	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasar arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pemerintah Daerah	Koordinasi dengan kementerian terkait untuk proses integrasi atau menggunakan aplikasi umum yang sudah disediakan oleh Kementerian terkait
35-2	Kampung Media	Kampung Media merupakan portal berbagi informasi dan jurnalisme warga yang dibina oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2014 Kampung Media mendapat penghargaan 9 Top Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. Aplikasi masih menggunakan domain .com dan mengandung iklan komersil	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pemerintah Daerah	Jika aplikasi adalah milik Pemprov NTB maka migrasi domain menggunakan domain .ntbprov.go.id dan menghilangkan iklan komersil dalam aplikasi

35-3	e-Samsat	Tujuan aplikasi untuk mempermudah dalam pelayanan pembayaran samsat kendaraan. Pengguna : Bank Penerima, Badan, Wajib Pajak dan Bank RKUD. E-SAMSAT telah menyediakan modul transaksi pajak secara real time.	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasi/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Insansi Pemerintah Daerah	Monitoring, evaluasi dan pengembangan aplikasi e-samsat untuk memenuhi permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan internal/eksternal, dan integrasi dengan aplikasi SPBE lainnya
------	----------	---	---	--

### 4.3 Trend Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi

Suatu dokumen rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang baik hendaknya memperhatikan dan mengantisipasi trend perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ke depan. Pada saat menyusun rancangan teknis arsitektur SPBE tentunya harus mengadaptasi teknologi TIK di masa yang akan datang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi NTB, agar teknologi yang diterapkan tidak ketinggal zaman dapat tetap digunakan secara efektif dan efisien dalam kurun beberapa tahun ke depan. Berikut ini adalah beberapa trend perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup mempengaruhi dan mulai banyak diimplementasikan oleh berbagai organisasi atau perusahaan di lingkup nasional Indonesia :

- a) Mobile internet merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan SPBE harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
- b) Cloud computing merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
- c) Internet of Things (IoT) merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.
- d) Big Data Analytics merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan pen)rusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- e) Artificial Intelligence (AI merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

**BAB V**  
**PERENCANAAN STRATEGIS**

**5.1 Visi**

Visi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 adalah : Mewujudkan NTB Smart Province yang menghadirkan birokrasi berkinerja tinggi dan layanan publik yang berkualitas dan terpercaya

**5.2 Misi**

1. Mencapai Maturitas Tata Kelola TIK yang Optimal
2. Memperkuat Infrastruktur TIK yang Mantap dan Terstandarisasi
3. Mewujudkan Layanan Pemerintahan dan Publik Berbasis Elektronik yang Terpadu, Menyeluruh dan Menjangkau Masyarakat Luas;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia TIK yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

**5.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi**

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 1 : Mencapai Maturitas Tata Kelola TIK yang Optimal</b>		
Mewujudkan Kebijakan Internal SPBE yang menyeluruh dan terkendali	Tersedianya kebijakan internal SPBE yang menyeluruh dan terkendali	Penyusunan/ pembaharuan kebijakan internal SPBE
		Pengendalian dan evaluasi kebijakan internal secara berkala atau sesuai kebutuhan
Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan SPBE	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan SPBE dengan optimal	Optimalisasi peran dan fungsi GCIO
		Koordinasi dan konsultasi Forum Komite e-Government
Mewujudkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan SPBE serta keselarasan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi	Terselenggaranya SPBE secara efektif, efisien dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi	Penyusunan Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Perencanaan dan Anggaran SPBE
		Pelaksanaan Manajemen SPBE
		Evaluasi dan Audit SPBE secara berkala atau sesuai kebutuhan
<b>Misi 2 : Memperkuat Infrastruktur TIK yang Mantap dan Terstandarisasi</b>		
Mengembangkan layanan pusat data (data center) elektronik dan pusat pemulihan bencana yang terpadu	Terwujudnya layanan pusat data elektronik dan pusat pemulihan bencana yang menyeluruh	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pusat data elektronik dan pusat pemulihan bencana
		Peningkatan layanan pusat data elektronik untuk perangkat daerah dan Kab/Kota
Mengembangkan sistem jaringan intra pemerintah yang	Terbangunnya jaringan intra pemerintah yang menyeluruh	Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan jaringan intra



menyeluruh		pemerintah untuk seluruh OPD
	Terselenggaranya layanan sistem penghubung layanan pemerintah yang integratif	Pengembangan dan Optimalisasi sistem penghubung layanan pemerintah untuk seluruh OPD
Mengembangkan sistem keamanan informasi yang tangguh dan responsif	Terbangunya infrastruktur keamanan informasi yang tangguh	Penyediaan/ pembaharuan perangkat dan fasilitas keamanan informasi
	Tersedianya Tim Respon Gangguan Keamanan Informasi (Government Computer Security Insiden Respon Team - Gov-CSIRT)	Pembentukan dan optimalisasi fungsi Gov-CSIRT
	Terselenggaranya Manajemen Keamanan Informasi yang memadai	Pembentukan kebijakan internal tentang Manajemen keamanan informasi
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen keamanan informasi
<b>Misi 3 : Mewujudkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terpadu, Menyeluruh dan Menjangkau Masyarakat Luas;</b>		
Meningkatkan Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu	Meningkatnya Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan yang terpadu	Pengembangan proses bisnis terintegrasi Pemprov NTB dan Seluruh OPD
		Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Pemerintahan
		Optimaliasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai
Mewujudkan layanan publik berbasis elektronik yang prima dan mudah diakses	Terselenggaranya sistem layanan publik yang prima dan mudah diakses	Pengembangan berbagai aplikasi layanan publik yang mudah diakses dan terintegrasi
		Pengembangan portal layanan publik yang menyeluruh dan informatif
		Pengembangan sistem layanan pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi
<b>Misi 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia TIK yang Profesional dan Berkinerja Tinggi</b>		
Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan TIK	Meningkatnya wawasan dan kepedulian Pimpinan Pemerintahan dalam pendayagunaan TIK	Pelatihan dan sertifikasi keahlian Kepemimpinan TIK (GCIO)
	Meningkatnya peran dan fungsi Kepemimpinan TIK pada unit kerja Bidang TIK	Penempatan pejabat unit kerja TIK sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi di Bidang TIK
Meningkatkan kapabilitas SDM TIK	Meningkatnya keterampilan dan keahlian SDM TIK yang sesuai standar kerja	Pelatihan dan sertifikasi keahlian bidang TIK yang terpadu dan berkesinambungan

	Meningkatnya jenjang karir pejabat fungsional Pranata Komputer secara teratur	Peningkatan pemahaman tentang jabatan fungsional pranata komputer
		Penempatan dan penugasan yang sesuai dengan fungsinya sebagai pranata komputer

## **BAB VI**

### **PETA RENCANA STRATEGIS**

Peta Rencana Strategis menjelaskan strategi pentahapan dalam pengembangan SPBE Pemerintah Provinsi NTB. Pada setiap tahapan pengembangan terdiri dari berbagai macam inisiatif strategis TIK yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

#### **6.1 Strategi Pentahapan**

Rencana strategis pengembangan SPBE Pemerintah Provinsi NTB dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu :

1. Tahap Penguatan Pondasi
2. Tahap Pengembangan Terintegrasi
3. Tahap Optimalisasi

Ketiga tahapan pengembangan tersebut akan dilaksanakan secara berurutan dimulai dari tahap Penguatan Pondasi, dilanjutkan dengan tahap Pengembangan Terintegrasi, dan ditutup dengan tahap Optimalisasi. Pada setiap tahapan akan dilaksanakan berbagai macam inisiatif TIK yang sedemikian rupa, sesuai dengan karakteristik dan maksud serta tujuan dari setiap tahapan tersebut. Tahap Penguatan Pondasi akan dimulai di akhir tahun 2019 hingga tahun 2020. Tahapan Pengembangan Terintegrasi diharapkan dapat berlangsung selama tahun 2021 hingga tahun 2022, dan tahapan Optimalisasi sebagai tahapan pamungkas diharapkan dapat dilaksanakan dan tuntas pada tahun 2023. Setiap tahapan dalam proses pengembangan akan menjadi landasan dan mendukung bagi pengembangan di tahap berikutnya. Ilustrasi dari strategi tahapan pengembangan SPBE Provinsi NTB dapat dilihat pada Gambar 5.0. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan tujuan dan karakteristik dari inisiatif TIK pada masing-masing tahapan

##### **6.1.1 Tahap Penguatan Pondasi**

Ini adalah tahapan awal dalam rangkaian pentahapan pengembangan SPBE Pemprov NTB. Pada tahapan ini bertujuan untuk memperkuat berbagai komponen mendasar SPBE yang telah terbangun atau berjalan dari hasil pengembangan e-Government sebelumnya. Dalam upaya memperkuat pondasi, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan pengembangan SPBE terkini, khususnya kebijakan yang terdapat dalam Rencana Induk SPBE Nasional. Tahapan awal ini diharapkan bisa tuntas selama satu Tahun, yakni dimulai di akhir tahun 2019 hingga Tahun 2020. Capaian yang ingin dihasilkan pada tahapan ini adalah :

1. Tersedianya berbagai kebijakan internal yang akan menjadi payung hukum, dasar dan panduan dalam pelaksanaan berbagai inisiatif TIK.
2. Terbangunya komitmen dan pemahaman yang sama di level pimpinan akan arti penting pengembangan SPBE yang terkoordinasi dan terintegrasi

3. Terbangunya koordinasi yang baik dan menyeluruh dari seluruh unsur kelembagaan SPBE untuk mengembangkan SPBE yang efektif dan efisien
4. Tersedianya infrastruktur dasar dan pemantapan layanan SPBE utama yang akan menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut pada tahap berikutnya.
5. Profil SDM TIK beserta kurikulum pelatihan dan sertifikasi keahlian Bidang TIK yang berkelanjutan

### **6.1.2 Tahap Pengembangan Terintegrasi**

Pada tahapan ini pengembangan SPBE difokuskan pada peningkatan pengembangan sistem Layanan SPBE terintegrasi, yang memungkinkan kolaborasi antar Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi hingga antar instansi Kabupaten/ Kota bahkan dengan instansi Pusat. Pengembangan infrastruktur SPBE yang menopang penyelenggaraan berbagai jenis layanan SPBE akan semakin diperluas dan diperkuat Tahapan ini akan dilaksanakan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2022. Capaian yang ingin dihasilkan pada tahapan ini adalah :

1. Tersedianya berbagai aplikasi layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi, baik berupa penggunaan aplikasi umum ataupun pengembangan aplikasi khusus yang memungkinkan kolaborasi antar unit kerja atau instansi pemerintah;
2. Tersedianya berbagai aplikasi layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha, yang dapat diakses secara luas dan mudah;
3. Perluasan dan peningkatan pengembangan infrastruktur SPBE, khususnya untuk memperkuat sistem interoperabilitas berbagai layanan SPBE;
4. Terlaksananya proses manajemen SPBE yang meliputi manajemen Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Pengetahuan, dan Manajemen Perubahan
5. Peningkatan kualitas keahlian SDM TIK dengan memperbanyak sertifikasi keahlian bidang TIK berstandar nasional maupun internasional

### **6.1.3 Tahap Optimalisasi**

Tahap optimalisasi adalah tahap akhir dalam periode pengembangan SPBE, yakni dilaksanakan pada Tahun 2023. Pada tahap ini semua capaian yang telah dihasilkan pada tahapan sebelumnya akan semakin disempurnakan hingga mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Capaian akhir yang diharapkan akan terwujud pada tahap akhir ini adalah :

1. Berbagai layanan administrasi pemerintah dan layanan publik telah berjalan dan dimanfaatkan dengan optimal dan senantiasa dapat memenuhi kebutuhan penggunanya;
2. Berbagai kebijakan SPBE dapat terselenggara dengan baik, konsisten, terpantau dan terevaluasi sesuai dengan periode dan kebutuhan;
3. Berbagai proses manajemen SPBE berjalan dengan optimal menghasilkan penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas;

4. Berbagai infrastruktur SPBE semakin meningkat keandalannya, ketersediaan dan keberlangsungan layanannya;
5. Tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan secara baik sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku untuk memastikan terselenggaranya SPBE secara optimal.

## **6.2 Inisiatif Strategis**

Inisiatif Strategis adalah berbagai inisiatif dan solusi TIK yang bersifat strategis untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi yang diinginkan melalui Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemprov NTB hingga lima tahun ke depan. Inisiatif Strategis akan dipetakan menjadi 4 kategori, yaitu Tata Kelola SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan SPBE, dan SDM SPBE

### **6.2.1 Tata Kelola SPBE**

#### **a. Pembuatan Rencana Induk dan Arsitektur SPBE**

- Rencana Induk SPBE merupakan dokumen rencana strategis yang menjadi dasar dan pedoman dalam pengembangan SPBE dalam kurun waktu 5 tahun. Rencana induk SPBE harus selaras dan mendukung kebijakan rencana pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Periode 2019 – 2023, serta mengacu pada Rencana Induk SPBE Nasional, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Arsitektur SPBE merupakan dokumen yang melengkapi Rencana Induks SPBE. Ia merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

#### **b. Pembentukan dan Penguatan Tim Koordinasi SPBE**

- Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden nomor 95 tentang SPBE, unsur kelembagaan SPBE Pemprov NTB yang semula berupa Komite E-Government akan diubah nomenklaturnya menjadi Tim Koordinator SPBE Provinsi NTB yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Kapasitas tim koordinasi SPBE perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.
- Peran dan fungsi Tim Koordinasi SPBE dapat dioptimalkan melalui Rapat Koordinasi yang diselenggarakan secara reguler atau sesuai kebutuhan

#### c. Penguatan Kebijakan Internal SPBE

- Kebijakan internal SPBE dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur hingga kebijakan teknis berupa Standar Operasional Prosedur serta Petunjuk Pelaksanaan.
- Kebijakan internal yang telah ada sebelumnya perlu dievaluasi untuk menentukan apakah perlu diperbaharui/ diganti untuk memenuhi berbagai aspek yang dipersyaratkan untuk meningkatkan indeks SPBE pada domain kebijakan internal
- Berbagai kebijakan internal yang perlu diperkuat diantaranya terkait dengan kelembagaan SPBE, Perencanaan dan Penganggaran SPBE, Proses Bisnis Terintegrasi, Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Keamanan Informasi, dan berbagai layanan SPBE

#### d. Pelaksanaan Manajemen SPBE

- Manajemen SPBE dilaksanakan untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
- Manajemen SPBE meliputi Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Pengetahuan, dan Manajemen Perubahan.
- Pelaksanaan Manajemen SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia. Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

#### e. Evaluasi Pelaksanaan SPBE dan Audit TIK

- Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan SPBE perlu dievaluasi dan diaudit secara reguler untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.
- Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata yang kelola, teknologi informasi dan komunikasi, dan Layanan SPBE.
- Evaluasi SPBE dapat dilaksanakan secara mandiri dan periodik mengikuti agenda Evaluasi SPBE Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB atau sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi
- Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dimaksudkan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi mengikuti standar dan aturan audit TIK yang berlaku yang sedikitnya meliputi Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan Informasi.

## 6.2.2 Teknologi Informasi dan Komunikasi

### a. Penguatan Pusat Data Elektronik Terpadu

- Pusat Data Elektronik Pemerintah Provinsi NTB yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik perlu terus dikembangkan dan diperkuat agar dapat memenuhi standar pusat data dan diakui secara Nasional. Beberapa aspek pusat data yang perlu dikembangkan adalah :
  - Ruang dan fasilitas pendukungnya yang representasi sesuai standar pusat data
  - Perangkat server dan jaringan yang memadai untuk memenuhi kapasitas layanan data center
  - Kualitas dan kuantitas penyelenggaraan layanan data center
- Beberapa jenis layanan pusat data elektronik yang dapat diselenggarakan adalah :
  - hosting aplikasi/website;
  - pemberian nama domain di bawah domain .ntbprov.go.id;
  - virtual private server;
  - colocation server;
  - cloude server;
  - email server;
- Sebagai bagian dari standar pusat data, perlu disiapkan juga Pusat Pemulihan Bencana untuk menjamin kelangsungan layanan pusat data bila mana terjadi gangguan

### b. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah

- Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam unit kerja pemerintah.
- Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya.
- Jaringan intra pemerintah yang dibangun adalah Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi yang menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah Provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi NTB;
- Jaringan intra pemerintah yang telah terbangun perlu ditingkatkan cakupan dan kualitas aksesnya sehingga seluruh perangkat daerah dapat terhubung dan memanfaatkan akses jaringan yang cepat, lancar dan aman

### c. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi.
- Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE.
- Implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB menggunakan aplikasi Mantra yang dikembangkan oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika. Diperlukan sosialisasi, edukasi dan fasilitasi pemanfaatan aplikasi Mantra yang lebih menyeluruh kepada perangkat daerah untuk mendukung interoperabilitas antar sistem elektronik.

#### d. Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Daerah

- Pengembangan sistem keamanan informasi pemerintah provinsi ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Pengembangan sistem keamanan informasi nasional mencakup:
  - penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
  - penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
  - pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.

#### e. Pengembangan Command Center Provinsi

- Command Center Provinsi berfungsi sebagai Pusat Kendali yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi.
- Command Center Provinsi akan mengintegrasikan berbagai layanan SPBE yang dapat digunakan oleh Pimpinan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

### 6.2.3 Layanan SPBE

#### a. Pengembangan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Pengembangan layanan administrasi pemerintahan dilaksanakan melalui penyusunan proses bisnis terintegrasi dan penggunaan aplikasi sistem elektronik yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- Aplikasi layanan administrasi pemerintahan diarahkan pada penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dan kolaborasi antar aplikasi layanan administrasi pemerintahan, untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan data/ dan informasi
- Berbagai layanan administrasi pemerintah yang perlu dikembangkan di antaranya yang utama adalah :
  - Sistem naskah dinas elektronik
  - Sistem manajemen kepegawaian
  - Sistem manajemen perencanaan
  - Sistem penganggaran



- Sistem manajemen keuangan
- Sistem manajemen kinerja
- Sistem pengadaan secara elektronik
- Sistem layanan pengaduan publik
- Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
- Whistle Blowing System

#### b. Pengembangan Layanan Publik Berbasis Elektronik

- Pengembangan Layanan Publik berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
- Pengembangan Layanan Publik berbasis elektronik dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi sistem elektronik layanan publik yang dapat mempermudah, mempercepat dan memperluas jangkauan akses layanan.
- Beberapa sistem layanan publik utama yang harus disediakan oleh Pemerintah Provinsi adalah :
  - Sistem Layanan Perijinan Terpadu yang terintegrasi dengan One Single Submission (OSS);
  - Sistem Pengaduan Layanan Publik
  - Sistem Pengaduan Pelanggaran Pemerintah
  - Sistem Layanan Informasi melalui Situs Web Perangkat Daerah
  - Sistem Layanan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) untuk permintaan informasi publik
  - Sistem Layanan Publik berbagai Sektor strategis, seperti Pendidikan dan Pengajaran, Tenaga Kerja dan Usaha, Komunikasi dan Informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

#### c. Pengembangan Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan.
- Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan.

- Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal taeb, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.
- Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

#### d. Pengembangan Portal Layanan Publik Berbasis Elektronik

- Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah.
- Portal pelayanan publik Pemerintah Provinsi akan menyatukan akses serta mengintegrasikan berbagai sistem layanan publik yang diselenggarakan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah NTB;
- Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
- Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.
- Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

#### e. Penyelenggaraan Manajemen Layanan

- Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.
- Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.
- Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
  - pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
  - pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
  - pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal taeb, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.

#### f. Pemantauan dan Evaluasi Layanan SPBE

- Pemantauan dan Evaluasi Layanan SPBE merupakan upaya untuk memastikan manajemen layanan SPBE berjalan dengan baik serta untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE.
- Pemantauan dan Evaluasi Layanan SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan.

### 6.2.4 Pengembangan SDM TIK

#### a. Promosi literasi SPBE

- Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat.
- Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal.
- Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.

#### b. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE

- Keberhasilan penyelenggaraan layanan SPBE sangat ditentukan oleh kualitas ASN penyelenggara SPBE
- Peningkatan kapasitas ASN Penyelenggara SPBE dapat dilakukan melalui :
  - Pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan dan berkesinambungan.
  - Pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE, contohnya jabatan fungsional pranata komputer;
  - Penempatan atau penugasan SDM TIK khususnya fungsional yang terkait SPBE, pada bidang yang menangani atau menyelenggarakan layanan SPBE, agar kompetensinya termanfaatkan dan terus meningkat serta mendukung jenjang karir fungsionanya

#### c. Penyelenggaraan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah

- Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
- Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
  1. penyampaian ide/gagasan SPBE;
  2. pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
  3. peningkatan kompetensi teknis;
  4. perbaikan kualitas Layanan SPBE;
  5. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan

6. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.

- Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

### 6.3 Peta Rencana

Berbagai inisiatif strategis SPBE yang telah diidentifikasi perlu dituangkan dalam suatu peta rencana yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Pengembangan SPBE Pemerintah Provinsi selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Peta Rencana SPBE Pemprov NTB akan dipetakan dalam 4 kelompok, yaitu Tata Kelola SPBE, Infrastruktur SPBE, Layanan SPBE, dan Sumber Daya Manusia SPBE, sebagaimana yang tampilkan dalam tabel berikut :

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
<b>A. Tata Kelola SPBE</b>				
1	Pembuatan Rencana Induk dan Arsitektur SPBE Provinsi NTB	Rencana Induk SPBE Pemprov NTB	2019	Dinas Kominfotik
		Arsitektur SPBE Pemprov NTB		Dinas Kominfotik
2	Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemprov NTB	Tim Koordinasi SPBE Provinsi NTB	2020	Dinas Kominfotik
3	Rapat Koordinasi dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Pemprov	Kebijakan, Kesepakatan, Rekomendasi Penyelenggaraan SPBE	2020 - 2023	
4	Penguatan Kebijakan Internal SPBE	Kebijakan Internal yang mencakup di antaranya : - Rencana Induk SPBE Pemprov NTB; - Tim Kordinasi SPBE; - Bisnis Proses Terintegrasi; - Perencanaan dan Penganggaran TIK; - Pengoperasian Pusat Data ( <i>data center</i> ); - Integrasi Sistem Aplikasi; - Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai; - Sistem Naskah Dinas Elektronik; - Sistem Manajemen Kepegawaian; - Sistem Manajemen Perencanaan dan Penganggaran; - Sistem Manajemen Keuangan; - Sistem Manajemen Kinerja; - Sistem Pengadaan Secara Elektronik; - Sistem Pengaduan Publik; - Sistem Jaringan Informasi	2020	Dinas Kominfotik Biro Organisasi Biro Hukum Biro APP Bappeda BPKAD BKD

		dan Dokumentasi Hukum (JDIH); - Sistem Pengaduan Pelanggaran Pemerintah (Wishtle Blowing System – WBS); - Sistem Pelayanan Publik;		
5	Pembuatan Peta Proses Bisnis Terintegrasi	Peta Proses Bisnis Terintegrasi	2020	Biro Organisasi
6	Penyelenggaraan Manajemen SPBE yang meliputi : Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Pengetahuan, dan Manajemen Perubahan	Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Manajemen SPBE	2021 - 2023	Dinas Kominfotik, Bappeda, BPKAD
7	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SPBE	Rencana Anggaran SPBE	2020 - 2023	Dinas Kominfotik Bappeda BPKAD
8	Evaluasi dan Audit Penyelenggaraan SPBE	- Evaluasi SPBE Tingkat Provinsi; - Audit TIK, meliputi Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, Audit Keamanan Informasi.	2020 - 2023	Dinas Kominfotik

#### **B. Infrastruktur SPBE**

8	Peningkatan Ruang dan Fasilitas Pusat Data	Ruang dan Fasilitas yang memenuhi Standar	2020	Dinas Kominfotik
9	Peningkatan kinerja dan kapasitas perangkat server dan jaringan Pusat Data	Perangkat Server dan Jaringan yang semakin meningkat performa dan kapasitasnya	2021 - 2022	Dinas Kominfotik
10	Pengembangan jaringan intra pemerintah	Jaringan Intra Pemerintah yang menghubungkan seluruh perangkat Daerah Provinsi	2020 - 2023	Dinas Kominfotik
11	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang mengintegrasikan seluruh sistem layanan pemerintah Provinsi	2020 - 2023	Dinas Kominfotik
12	Pengembangan Portal Satu Data NTB	Portal Satu Data NTB terintegrasi dengan Kabupaten/Kota	2021	Dinas Kominfotik
13	Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Provinsi	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2020	Dinas Kominfotik
		Peningkatan Teknologi Keamanan Informasi	2021	Dinas Kominfotik
		Pembentukan Government CSIRT (Computer Security Insident Responst Team)	2020	Dinas Kominfotik
		Peningkatan Budaya	2020 - 2023	Dinas

		Keamanan Informasi		Kominfo
14	Pengembangan Provincial Command Center (PCC)	Fasilitas dan Sistem Informasi Provincial Command Center	2022	Dinas Kominfo
<b>C. Layanan SPBE</b>				
15	Pengembangan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik terintegrasi	Arsitektur proses bisnis layanan administrasi pemerintahan terintegrasi	2020	Perangkat Daerah difasilitasi Dinas Kominfo
		Integrasi aplikasi layanan administrasi pemerintahan	2021 - 2022	Dinas Kominfo
16	Pembuatan Portal Layanan Administrasi Pemerintahan	Portal Layanan Administrasi Pemerintahan	2022	Dinas Kominfo
17	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Elektronik terintegrasi	Arsitektur proses bisnis layanan publik terintegrasi	2020	Perangkat Daerah difasilitasi Dinas Kominfo
		Integrasi aplikasi layanan publik	2021 - 2022	Dinas Kominfo
18	Pengembangan Portal Layanan Publik	Portal Layanan Publik	2022	Dinas Kominfo
19	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	Sosialisasi dan Edukasi Manajemen Layanan	2020	Perangkat Daerah difasilitasi Dinas Kominfo
20	Pemantauan dan Evaluasi Layanan SPBE	- Manajemen Layanan SPBE berjalan dengan baik; - Layanan SPBE memenuhi harapan masyarakat.	2020 - 2023	Dinas Kominfo
<b>D. Sumber Daya Manusia SPBE</b>				
21	Promosi literasi SPBE	Pelatihan dan Sosialisasi SPBE	2020	Dinas Kominfo
22	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi TIK	2020 - 2023	Dinas Kominfo, BPSDM
		Sosialisasi, Edukasi dan Koordinasi Jabatan Fungsional terkait SPBE	2020 - 2023	BKD, Dinas Kominfo
		Forum Koordinasi Pejabat Fungsional terkait SPBE	2020 - 2023	BKD, Dinas Kominfo
23	Penyelenggaraan Forum kolaborasi SPBE	Forum Kolaborasi SPBE	2020 - 2023	Dinas Kominfo

## BAB VII

### ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### 7.1 Arsitektur Proses Bisnis

Penyusunan Arsitektur Bisnis Proses Pemerintah Provinsi NTB mengacu pada standar yang telah ditetapkan, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di dalam instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan.
2. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan.
3. Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

##### b. Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

##### c. Level Selanjutnya (Level n)

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

1. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
2. Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
3. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
4. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
5. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;

#### 7.1.1 Identifikasi Proses Bisnis Pemerintah Provinsi NTB

Mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, untuk menyusun peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTB, perlu dilakukan analisis terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023. Dari hasil analisis tersebut, berikut ini adalah identifikasi Proses Bisnis level 0, 1, dan 2 :

a. Proses Bisnis Level 0

No	Proses	Jenis Proses	Kode Proses
1	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Utama	NTB.01
2	Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah	Utama	NTB.02
3	Peningkatan konektivitas antar wilayah	Utama	NTB.03
4	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Manajemen	NTB.04
5	Peningkatan Manajemen SDM ASN berbasis Merit sistem	Manajemen	NTB.05
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Utama	NTB.06
7	Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Utama	NTB.07
8	Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Utama	NTB.08
9	Peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Utama	NTB.09
10	Peningkatan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Utama	NTB.10
11	Peningkatan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha	Utama	NTB.11
12	Peningkatan daya saing industri	Utama	NTB.12
13	Peningkatan daya saing pariwisata	Utama	NTB.13
14	Peningkatan produksi Sektor Primer	Utama	NTB.14
15	Peningkatan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Utama	NTB.15
16	Pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Utama	NTB.16
17	Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Utama	NTB.17
18	Penurunan pengangguran terbuka	Utama	NTB.18
19	Penjagaan stabilitas harga kebutuhan pokok	Utama	NTB.19
20	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pendukung	NTB.20
21	Peningkatan Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Utama	NTB.21
22	Peningkatan Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Pendukung	NTB.22
23	Peningkatan kesadaran politik masyarakat	Utama	NTB.23
24	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Utama	NTB.24

b. Proses Bisnis Level 1

Proses	Sub Proses	Kode Sub Proses	Perangkat Daerah
Peningkatan kapasitas	Pencegahan dini dan	NTB.01.01	Badan Penanggulangan



penanggulangan bencana	penanggulangan korban bencana alam		Bencana Daerah
Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah	Pembangunan jalan dan jembatan	NTB.02.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	NTB.02.02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	NTB.02.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	NTB.02.04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	NTB.02.05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan konektivitas antar wilayah	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	NTB.03.01	Dinas Perhubungan
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	NTB.03.02	Dinas Perhubungan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	NTB.03.03	Dinas Perhubungan
	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	NTB.03.04	Dinas Perhubungan
	Pengembangan Transportasi Laut	NTB.03.05	Dinas Perhubungan
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	NTB.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	NTB.04.02	Inspektorat
	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	NTB.04.03	Inspektorat
	Peningkatan Kapabilitas APIP	NTB.04.04	Inspektorat
	Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	NTB.04.05	Biro Organisasi
	Evaluasi Kinerja SKPD	NTB.04.06	Biro Organisasi
	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	NTB.04.07	Inspektorat
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	NTB.04.08	Biro Pemerintahan
Peningkatan Manajemen SDM ASN berbasis Merit sistem	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	NTB.05.01	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	NTB.05.02	Badan Kepegawaian Daerah
	pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur	NTB.05.03	Biro Organisasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Penataan Administrasi Kependudukan	NTB.06.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	NTB.06.02	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	NTB.06.03	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
	Pengembangan e-Government	NTB.06.04	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
	Pencegahan Korupsi	NTB.06.05	Inspektorat
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	NTB.06.06	Biro Organisasi
	Kerjasama Informasi dan Media massa	NTB.06.07	Biro Humas dan Protokol
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	NTB.06.08	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
	Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	NTB.06.09	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	NTB.07.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	NTB.07.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	NTB.07.03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	NTB.07.04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Manajemen Pelayanan Pendidikan	NTB.07.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Ketenagaan	NTB.07.06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	NTB.07.07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	NTB.07.08	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	NTB.07.09	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	NTB.07.10	Dinas Pemuda dan Olahraga
Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	NTB.08.01	Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	NTB.08.02	Dinas Kesehatan
	Sumber Daya Kesehatan	NTB.08.03	Dinas Kesehatan

	Obat dan Perbekalan Kesehatan	NTB.08.04	Dinas Kesehatan
	Upaya Kesehatan Masyarakat	NTB.08.05	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	NTB.08.06	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	NTB.08.07	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	NTB.08.08	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
	Perbaikan Gizi Masyarakat	NTB.08.09	Dinas Kesehatan
	Pengembangan Lingkungan Sehat	NTB.08.10	Dinas Kesehatan
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	NTB.08.11	Dinas Kesehatan
	Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	NTB.08.12	DP3AP2KB
Peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan asongan	NTB.09.01	Dinas Perdagangan
Peningkatan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	NTB.10.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil	NTB.10.02	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	NTB.10.03	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	NTB.10.04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Perencanaan Tata Ruang	NTB.10.05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemanfaatan Ruang	NTB.10.06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	NTB.10.07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengembangan Kinerja	NTB.10.08	Dinas Lingkungan

	Pengelolaan Persampahan		Hidup dan Kehutanan
Peningkatan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	NTB.11.01	DPMPPTSP
Peningkatan daya saing industri	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	NTB.12.01	Dinas Perindustrian
	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	NTB.12.02	Dinas Perindustrian
	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	NTB.12.03	Dinas Perindustrian
	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	NTB.12.04	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	NTB.12.05	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	NTB.12.06	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan daya saing pariwisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	NTB.13.01	Dinas Pariwisata
	Pengembangan Destinasi Pariwisata	NTB.13.02	Dinas Pariwisata
	Pengembangan Kemitraan	NTB.13.03	Dinas Pariwisata
	Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	NTB.13.04	Dinas Pariwisata
Peningkatan produksi Sektor Primer	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	NTB.14.01	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	NTB.14.02	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	NTB.14.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	NTB.14.04	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	NTB.14.05	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	NTB.14.06	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Budidaya Perikanan	NTB.14.07	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	NTB.14.08	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pengelolaan Hutan	NTB.14.09	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peningkatan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	NTB.15.01	Dinas Kesehatan
	Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	NTB.15.02	Dinas Sosial
	Pelayanan dan Rehabilitasi	NTB.15.03	Dinas Sosial

	Kesejahteraan Sosial		
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	NTB.15.04	Dinas Sosial
	Jaminan Sosial	NTB.15.05	Dinas Sosial
Pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	NTB.16.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	NTB.16.02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	NTB.16.03	Dinas Kesehatan
	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	NTB.16.04	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pengembangan Perumahan	NTB.16.05	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pengembangan Permukiman	NTB.16.06	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	NTB.16.07	Dinas Perumahan dan Permukiman
Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	NTB.17.01	Dinas Ketahanan Pangan
	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	NTB.17.02	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penurunan pengangguran terbuka	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	NTB.18.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	NTB.18.02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	NTB.18.03	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pengawasan Ketenagakerjaan	NTB.18.04	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penjagaan stabilitas harga kebutuhan pokok	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	NTB.19.01	Dinas Perdagangan
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	NTB.20.01	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Peningkatan Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Keagamaan	NTB.21.01	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	NTB.21.02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengembangan Nilai Budaya	NTB.21.03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	NTB.21.04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

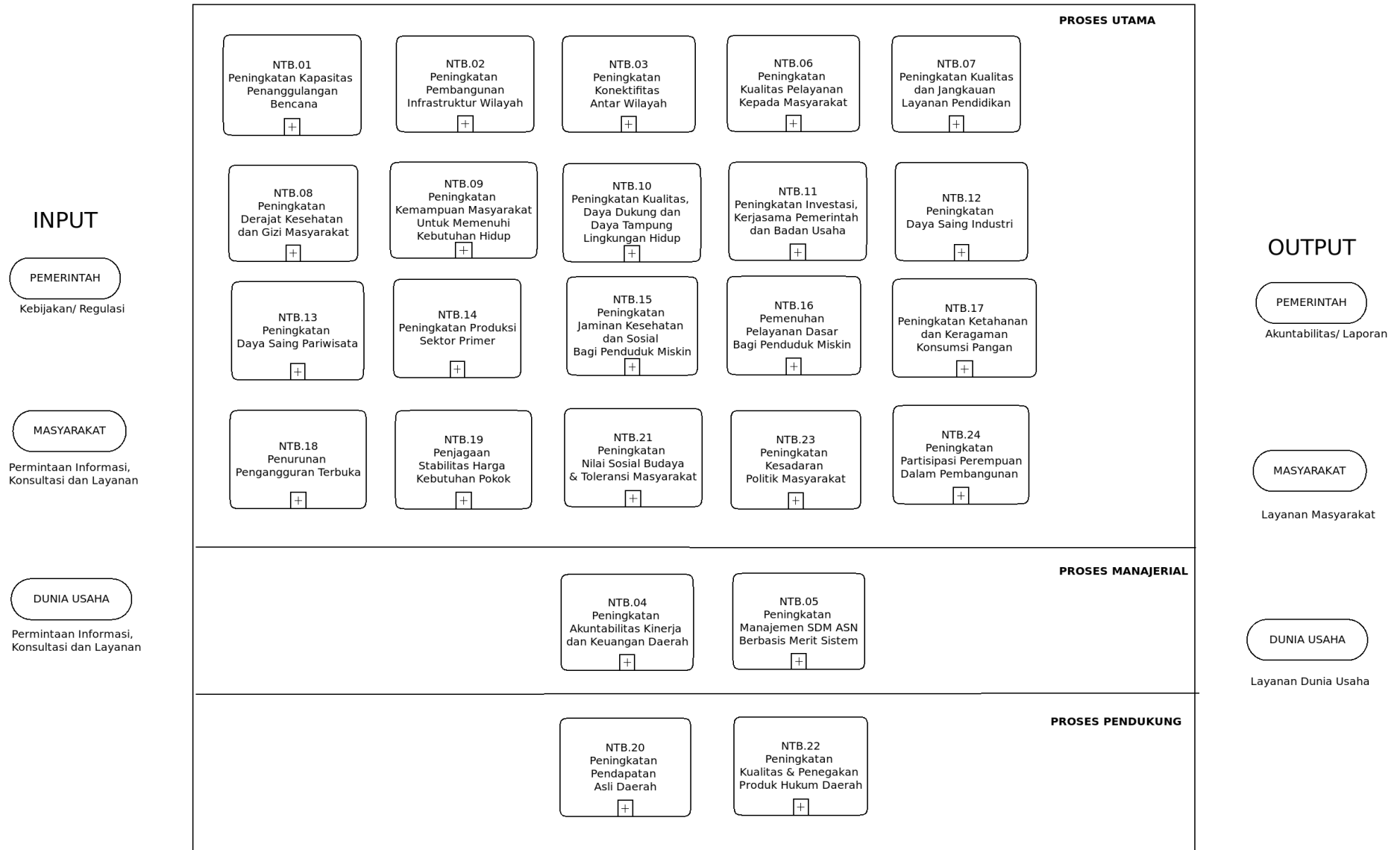
	Pengelolaan Keragaman Budaya	NTB.21.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	NTB.22.01	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	NTB.22.02	Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	NTB.22.03	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	NTB.22.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	Penataan Peraturan Perundang-undangan	NTB.22.05	Biro Hukum
Peningkatan kesadaran politik masyarakat	Pendidikan Politik Masyarakat	NTB.23.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.	NTB.24.01	DP3AP2KB
	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	NTB.24.02	DP3AP2KB
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	NTB.24.03	DP3AP2KB
	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	NTB.24.04	DP3AP2KB

### 7.1.2 Peta Proses Bisnis

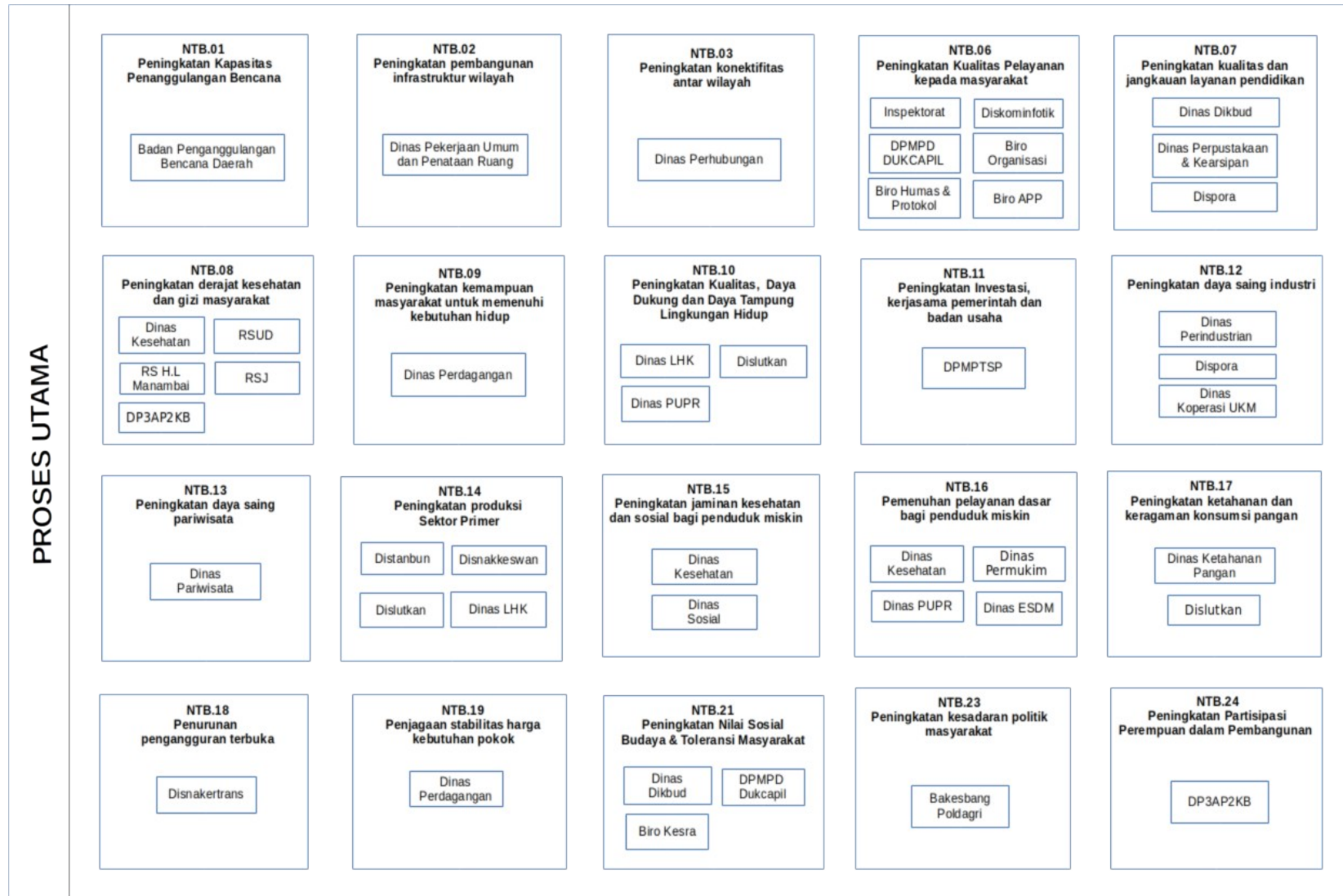
Setelah seluruh proses bisnis untuk setiap level diidentifikasi, berikutnya akan digambarkan dalam bentuk peta bisnis proses yang terdiri dari Peta Bisnis Proses Level 0, level 1, hingga level n, dan peta Relasi. Berikut ini dapat digambarkan beberapa peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTB :

a. Peta Proses Bisnis Level 0

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

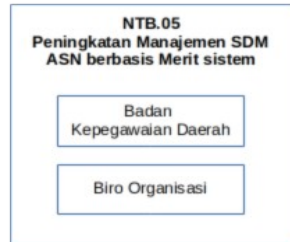
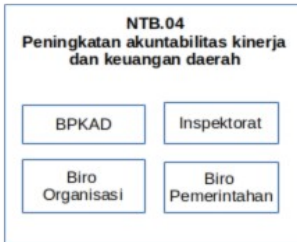


b. Peta Relasi

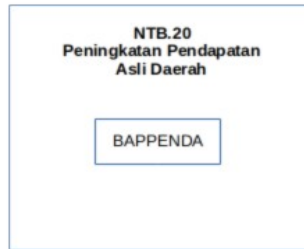
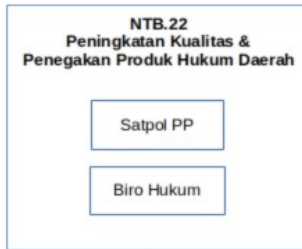




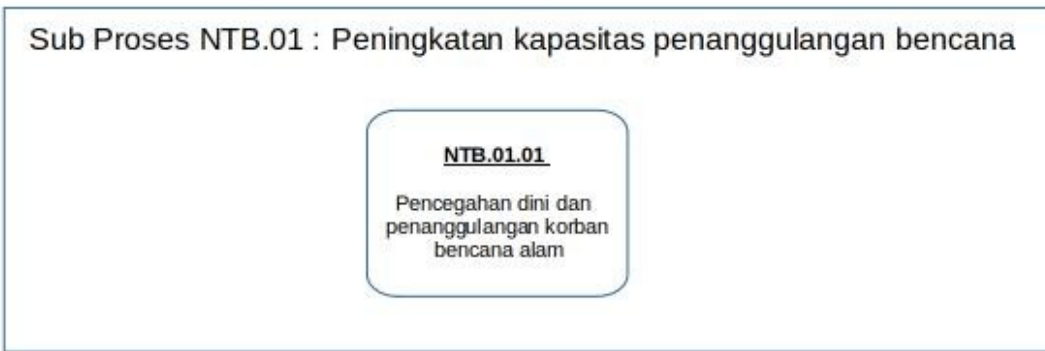
**PROSES MANAJEMEN**



**PROSES PENDUKUNG**



## Peta Sub Proses



Sub Proses NTB.04 : Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah



Sub Proses NTB.05 : Peningkatan Manajemen SDM ASN berbasis Merit sistem



Sub Proses NTB.06 : Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat



Sub Proses NTB.07 : Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan

<b>NTB.07.01</b> Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	<b>NTB.07.02</b> Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	<b>NTB.07.03</b> Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK PLK)	<b>NTB.07.04</b> Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	<b>NTB.07.05</b> Manajemen Pelayanan Pendidikan
<b>NTB.07.06</b> Pembinaan Ketenagaan	<b>NTB.07.07</b> Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	<b>NTB.07.08</b> Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	<b>NTB.07.09</b> Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	<b>NTB.07.10</b> Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Sub Proses NTB.08 : Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat

<b>NTB.08.01</b> Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	<b>NTB.08.02</b> Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak Menular	<b>NTB.08.03</b> Sumber Daya Kesehatan	<b>NTB.08.04</b> Obat dan Perbekalan Kesehatan
<b>NTB.08.05</b> Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>NTB.08.06</b> Standarisasi Pelayanan Kesehatan	<b>NTB.08.07</b> pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	<b>NTB.08.08</b> pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
<b>NTB.08.09</b> Perbaikan Gizi Masyarakat	<b>NTB.08.10</b> Pengembangan Lingkungan Sehat	<b>NTB.08.11</b> Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	<b>NTB.08.12</b> Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD

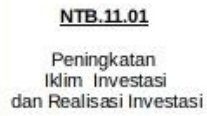
Sub Proses NTB.09 : Peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup

**NTB.09.01**  
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan

Sub Proses NTB.10 : Peningkatan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



Sub Proses NTB.11 : Peningkatan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha



Sub Proses NTB.12 : Peningkatan daya saing industri



Sub Proses NTB.13 : Peningkatan daya saing pariwisata



Sub Proses NTB.14 : Peningkatan Produksi Sektor Primer



Sub Proses NTB.15 : Peningkatan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin



Sub Proses NTB.16 : Pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk miskin

**NTB.16.01**

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah

**NTB.16.02**

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

**NTB.16.03**

Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar

**NTB.16.04**

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

**NTB.16.05**

Pengembangan Perumahan

**NTB.16.06**

Pengembangan Permukiman

**NTB.16.07**

perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Sub Proses NTB.17 : Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan

**NTB.17.01**

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)

**NTB.17.02**

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Sub Proses NTB.18 : Penurunan pengangguran terbuka

**NTB.18.01**

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

**NTB.18.02**

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

**NTB.18.03**

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

**NTB.18.04**

Pengawasan Ketenagakerjaan

Sub Proses NTB.19 : Penjagaan stabilitas harga kebutuhan pokok

**NTB.19.01**

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Sub Proses NTB.20 : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

**NTB.20.01**

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Proses NTB.21 : Peningkatan Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat

**NTB.21.01**

Peningkatan Pelayanan Keagamaan

**NTB.21.02**

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

**NTB.21.03**

Pengembangan Nilai Budaya

**NTB.21.04**

Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya

**NTB.21.05**

Pengelolaan Keragaman Budaya

Sub Proses NTB.22 : Peningkatan Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah

**NTB.22.01**

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

**NTB.22.02**

Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

**NTB.22.03**

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

**NTB.22.04**

pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

**NTB.22.05**

Penataan Peraturan Perundang-undangan

**NTB.22.06**

Bantuan Hukum dan HAM



Sub Proses NTB.23 : Peningkatan kesadaran politik masyarakat

**NTB.23.01**

Pendidikan Politik  
Masyarakat

Sub Proses NTB.24 : Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

**NTB.24.01**

Keserasian Kebijakan  
Peningkatan Kualitas  
anak dan Perempuan.

**NTB.24.02**

Peningkatan Peran serta  
dan Kesetaraan Gender  
Dalam Pembangunan

**NTB.24.03**

Penguatan Kelembagaan  
Pengarusutamaan  
Gender (PUG) dan anak

**NTB.24.04**

Peningkatan  
Kualitas Hidup dan  
Perlindungan Perempuan

## 7.2 Arsitektur Data dan Informasi

Dalam suatu sistem informasi, setiap proses bisnis yang diselenggarakan oleh unit kerja akan membutuhkan masukan data dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna atau dimanfaatkan oleh proses bisnis lain sebagai masukan kembali.

Dari hasil identifikasi dan analisis kebutuhan data dan informasi dari setiap proses dan sub proses bisnis Pemerintah Provinsi NTB, dihasilkan tabel pemetaan entitas data dan proses bisnis sebagai berikut :

Proses/ Sub Proses/ Fungsi	Kode Sub Proses	Entitas Data
<b>1 Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana</b>	NTB.01	Daerah tangguh bencana, daerah rawan bencana
<b>1 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	NTB.01.01	Aktifitas Penanggulangan Bencana oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam		Lokasi Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
2 Gladi Posko dan Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana		Peserta Gladi
3 Sosialisasi pengurangan resiko bencana		Peserta Sosialisasi
4 Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) Gempa dan Tsunami di KEK Mandalika		Dokumen Renkon
5 Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Kawasan Aman Bencana Banjir dan Tanah Longsor		Lokasi Penerapan
6 Pengurangan Daerah Rawan Kekeringan		Lokasi Rawan Kekeringan yang Tertangani
7 Penilaian Kinerja Desa tangguh Bencana		Desa Tangguh Bencana
8 Jambore Desa Tangguh Bencana (Destana)		Peserta Jambore
9 Peningkatan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Bencana		Aplikasi, Brosur dan Spanduk yang dibuat
10 Penyediaan dan Penyiapan Bahan, Barang dan Peralatan serta Personil untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanggulangan Bencana		Logistik yang disediakan
11 Penanganan Siaga Darurat Bencana		Kegiatan Penanganan Siaga Darurat Bencana
12 Penanganan Masa Tanggap Darurat		Korban yang ditangani Kejadian Bencana
13 Penanganan transisi ke pemulihan darurat		Lokasi Penanganan Kejadian Bencana
14 Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Desa Tangguh Bencana (Destana)		Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk
15 Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SAB)		Sekolah Aman Bencana yang Dibentuk
16 Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) evakuasi korban bencana alam		SOP yang Disusun

<b>2 Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah</b>	NTB.02	Persentase Kamantapan Jalan
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi
<b>1 Pembangunan jalan dan jembatan</b>	NTB.02.01	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)
1 Perencanaan Pembangunan Jalan		rencana pembangunan jalan provinsi (dokumen)
2 Pembangunan Jalan		Panjang jalan provinsi yg dibangun
3 Perencanaan Pembangunan Jembatan		rencana pembangunan jembatan (dokumen)
4 Pembangunan Jembatan		Jembatan yang dibangun
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		laporan bulanan, Tri Wulan dan Tahunan
6 Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan		Kegiatan dan Peserta Pembinaan
<b>2 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	NTB.02.02	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)
1 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan		Jembatan yang direhab/dipelihara
2 Rehabilitasi Jalan		Jalan yang direhab
<b>3 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	NTB.02.03	Daya tumbuh wilayah strategis
1 Pembangunan/peningkatan infrastruktur		infrastruktur pendukung wisata potensial yang terbangun
		infrastruktur kawasan permukiman nelayan
		kawasan pantai yang ditata
		Wisata Potensial
		Kawasan Permukiman Nelayan
<b>4 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	NTB.02.04	Indeks Kinerja Sistem Irigasi
1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi		Daerah Irigasi yang direncanakan
2 Pembangunan Jaringan Irigasi		Jaringan Irigasi yang dibangun
3 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi		Kegiatan Komisi Irigasi
		Jaringan Irigasi yang ditingkatkan
		Jaringan Irigasi
<b>5 Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>	NTB.02.05	Kapasitas tampung
1 Perencanaan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Embung dan Bangunan Penampung Air yang direncanakan
2 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya		Embung dan Bangunan Penampung Air yang dibangun
3 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air		Sumber Daya Air
<b>3 Peningkatan konektivitas antar wilayah</b>	NTB.03	Persentase konektivitas transportasi publik
<b>1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	NTB.03.01	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan		fasilitas terminal type B yang terpelihara

2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ		Fasilitas keselamatan LLAJ yang terpelihara
<b>2</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	NTB.03.02	Cakupan Angkutan yang Layak (%)
1	Pembinaan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan		Peserta Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi NTB
2	Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas		Aktifitas Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas
3	Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan		Hasil Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan Daerah Rawan Kecelakaan
4	Pengawasan dan Penertiban Perizinan Angkutan		kendaraan angkutan umum yang memiliki legalitas Kendaraan angkutan umum
5	Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan		Operasional Bus Rapid Transit (BRT) (armada, rute, penumpang)
6	Peningkatan/pengembangan Angkutan Udara se NTB		penumpang angkutan udara di 3 bandara
7	Pengawasan, Pengendalian Terminal		Kendaraan Angkutan Umum Yang Laik jalan Kendaraan angkutan umum
8	Pembinaan Penertiban, Pengelolaan Operasional Terminal		Retribusi Pelayanan Terminal Type B Penyewa Fasilitas Pelayanan Terminal Operator Bus di Terminal
<b>3</b>	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	NTB.03.03	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia (%)
1	Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut		Fasilitas Pelabuhan
<b>4</b>	<b>Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	NTB.03.04	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas
1	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan		Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang
2	Penyusunan Informasi/Database Fasilitas Keselamatan Jalan		Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang
3	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas		Hasil Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Provinsi NTB
<b>5</b>	<b>Pengembangan Transportasi Laut</b>	NTB.03.05	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang (%)
1	Peningkatan/Pengembangan Keselamatan Pelayaran		Hasil Pemantauan Keselamatan
2	Peningkatan/Pengembangan Kepelabuhan di NTB		Database Kepelabuhan
3	Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut di NTB		Rute angkutan laut yang dibentuk
<b>4</b>	<b>Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	NTB.04	Opini BPK Nilai SAKIP
1	<b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	NTB.04.01	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB Opini laporan keuangan Prov. NTB

1	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		perda dan pergub tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
2	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		Kegiatan sosialisasi regulasi
3	Penyusunan peraturan daerah dan peraturan Gubernur tentang APBD dan Perubahan APBD		perda dan pergub APBD dan Perubahan APBD
4	Peningkatan Pelayanan Kas Daerah / Kuasa BUD		SPM yang diterbitkan menjadi SP2D (%)
5	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial		Hasil evaluasi dan monitoring penerima hibah dan bansos Penerima hibah dan bansos
6	Implementasi Aplikasi Sisitem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		Aplikasi Sisitem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Asistensi dan Pembahasan RKA/RKAP/DPA/DPPA		Perangkat Daerah yang terfasilitasi
8	Evaluasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi		Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi yang tersampaikan
9	Pelatihan Pengelola Keuangan Daerah		Kursus/ Bintek/ pelatihan yang dilaksanakan
10	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersusun
11	Penyusunan dokumen informasi keuangan daerah		Dokumen laporan LAK, Pajak, dan SPJ Bendahara Penerimaan yang tersusun
12	Penataan dan pengembangan Informasi Arsip Keuangan		Arsip Keuangan yang ditertibkan
13	Peningkatan Kapasitas Pengeioiaan Keuangan Daerah		APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD yang disusun
14	Pengeioiaan Administrasi Keuangan PPKD		Dokumen Administrasi Keuangan yang dikelola
15	Publikasi Informasi Keuangan Daerah		Informasi/Dokumen yang dipublikasikan
16	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Dokumen laporan keuangan pemerintah daerah
17	Optimalisasi Pengelolaan Piutang Daerah		Piutang daerah yang tertagih Piutang daerah
18	Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer		dokumen pengelolaan dana transfer Dana Transfer
19	Verifikasi dan Evaluasi Pertanggungjawaban Penerimaan Daerah		Hasil evaluasi dan verifikasi penerimaan daerah Penerimaan Daerah
20	Penyusunan Pedoman RKA/RKAP SKPD		dokumen pedoman RKA/RKAP SKPD yang tersusun
21	Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB		Hasil Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB
<b>2</b>	<b>Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah</b>	<b>NTB.04.02</b>	<b>Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Temuan</b>
1	Tindak Lanjut Hasil Temuan		

	Pengawasan		Pengawasan
	2 Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah		Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP di SKPD Hasil Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah Laporan Keuangan Perangkat Daerah
	3 Reviu Atas Laporan Keuangan		Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
	4 Audit Kinerja		Hasil Audit Kinerja
	5 Joint Audit		Hasil Joint Audit
	6 Monev Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan BOS Pendidikan Menengah		Hasil Monev Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan BOS Pendidikan Menengah Laporan Keuangan Dana Desa Laporan Keuangan BOS
	7 Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)		Hasil Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Peserta Gelar Pengawasan Daerah
	8 Kegiatan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)		Hasil Monev Percepatan Penuntasan Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tuntutan Ganti Rugi Daerah
	9 Review KUA PPAS		Hasil Review KUA PPAS KUA PPAS
	10 Review RKA PD		Hasil Review RKA Perangkat Daerah RKA Perangkat Daerah
	11 Evaluasi LPPD Kab/Kota		Hasil Evaluasi LPPD Kab/Kota LPPD Kab/Kota
	12 Reviu Pengelolaan Anggaran dan PBJ		Hasil Review Pengelolaan Anggaran dan PBJ Laporan Pengelolaan Anggaran dan PBJ
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB</b>	NTB.04.03	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur
	1 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Aktifitas Pendampingan Penerapan SPIP
	2 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Hasil Evaluasi SPIP
	3 Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)		Hasil Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
<b>4</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas APIP</b>	NTB.04.04	Tingkat Kapabilitas APIP Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi
	1 Telahaan Sejawat		Pelaksanaan Telaah Sejawat peserta Diklat Substantif dan Penjenjangan
	2 Pelatihan Pengembangan APIP		
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</b>	NTB.04.05	Persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB
	1 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)		Dokumen LAKIP Dokumen Perjanjian Kinerja Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Nilai LAKIP Capaian Perjanjian Kinerja Capaian Rencana Kinerja Tahunan

<b>6 Evaluasi Kinerja SKPD</b>	NTB.04.06	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel Hasil Penilaian Kinerja SKPD
1 Penilaian kinerja SKPD		
<b>7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>	NTB.04.07	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA hasil Asistensi LKjIP Pemda LKjIP Pemda hasil Reviu LKJIP Pemda LKjIP Pemda hasil Reviu RPJMD Provinsi Hasil Reviu Renstra Pemda hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Aktifitas Pembinaan dan Pendampingan Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Akuntabilitas Hasil Reviu Renja Provinsi Renja Provinsi Hasil Reviu RKPD RKPD
1 Asistensi Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah		
2 Review LKjIP Pemda		
3 Evaluasi SAKIP PD		
4 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
5 Penilaian, Pembinaan dan Pendampingan PD		
6 Review Renja Provinsi		
7 Review RKPD		
<b>8 Peningkatan Kualitas Kelembagaan</b>	NTB.04.08	Rangking LPPD Dokumen LPPD Resume Rapat Koordinasi Pengembangan Peningkatan Kapasda Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Prov NTB Peringkat LPPD
1 Penyusunan LPPD Gubernur		
2 Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daerah Informasi Laporan Penyelenggaraan		
3 Pemerintahan Daerah (LPPD) Prov. NTB		
<b>5 Peningkatan Manajemen SDM ASN berbasis Merit sistem</b>	NTB.05	Indeks Profesionalisme ASN
<b>1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	NTB.05.01	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN Kriteria Penilaian Kinerja ASN CPNS CPPP Peserta Seleksi CPNS Peserta Seleksi CPPP PNS Mutasi PNS Pemprov NTB PNS Naik Pangkat Progress Pengelolaan Data Pegawai di Sistem Informasi Kepegawaian Daerah PNS Berprestasi PNS Pemprov NTB Kasus Pelanggaran Disiplin PNS PNS Berkasus PNS Pemprov NTB penempatan dan pembebasan dalam
1 Seleksi penerimaan calon PNS		
2 Penempatan PNS/PTT		
3 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS		
4 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah		
5 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi		
6 Penanganan Kasus		
7 Pembinaan dan Pengembangan Karir		

	Jabatan Struktural		jabatan struktural
			Pejabat Struktural PNS Pemprov
			PNS Pemprov NTB
8	Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional		pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan/pemberhentian dalam jabatan fungsional
			PNS Pejabat Fungsional
			PNS Pemprov NTB
9	Penilaian DUPAK dan Penetapan Angka Kredit		Hasil Penilaian DUPAK/PAK jabatan fungsional
10	Tugas Belajar dan Ijin Belajar		PNS yang mengikuti pendidikan formal praja/taruna yang lulus sekolah ikatan dinas
11	Seleksi Sekolah Ikatan Dinas		Hasil seleksi Sekolah Ikatan Dinas
12	Cuti dan Kesra ASN		ASN yang melakukan cuti
13	Pengambilan Sumpah Janji PNS dan Jabatan		ASN yang diambil sumpah PNS dan jabatan
14	Penilaian Kinerja ASN		Kinerja ASN
15	Penyusunan Data Kebutuhan Pegawai dan Formasi CPNS/P3K		usulan formasi CPNS/CPPPK
16	Ujian Kenaikan Pangkat PNS		ASN yang lulus ujian kenaikan pangkat melalui ujian dinas dan penyesuaian ijasah
17	Pemberhentian PNS/PTT		PNS/PTT diberhentikan
18	Penetapan dan Pengangkatan CPNS, PNS dan P3K		CPNS, PNS dan P3K yang diangkat
19	Pembangunan/Pengembangan Sistem Dokumentasi Elektronik Kepegawaian		Dokumentasi elektronik pegawai
20	Penyusunan Peta Komposisi ASN		Peta komposisi ASN
21	Penyusunan Data Informasi Kompetensi		Potensi dan Kompetensi ASN
22	Pemetaan kompetensi ASN		ASN yang mengikuti pemetaan kompetensi
			Peta Kompetensi ASN
23	Pelayanan Konseling ASN		Pegawai yang konseling
24	Kerjasama dan Promosi Pemetaan Kompetensi ASN		Hasil Kerjasama dan Promosi Pemetaan Kompetensi ASN
2	<b>Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara</b>	NTB.05.02	Persentase ASN yang Patuh LHKPN
	1 Pengelolaan Sistem Pelaporan LHKPN		ASN wajib LHKPN yang melapor
	2 Pembinaan ASN yang Wajib LHKPN		ASN wajib LHKPN yang dibina
3	<b>pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur</b>	NTB.05.03	
	1 Penyusunan Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan		Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
			Pedoman Syarat Jabatan
			Hasil Evaluasi Jabatan
	2 Pengembangan Sumber Daya Aparatur		Laporan Konseling Kasus Kepegawaian Jabatan Stuktural
6	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat</b>	NTB.06	Indeks Pelayanan Publik
	<b>1 Penataan Administrasi Kependudukan</b>	NTB.06.01	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk
	1 Bimtek tenaga pengelola SIAK		Pengelola SIAK terbina
	2 Pembentukan dan Penataan Sistem		Perangkat Sistem Koneksi



	Koneksi		
3	Pelaksanaan kebijakan kependudukan		Hasil Koordinasi Sekretariat Bidang Adminduk Hasil Koordinasi Terkait Pencapaian Target Nasional Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Hasi Perekaman KTP el
4	Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		Buku Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Buku Data Kependudukan Per Semester
5	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil		Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Peserta Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Tingkat Kab./Kota Peserta Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk Peserta Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil
6	Sosialisasi kebijakan kependudukan		Peserta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
7	Monitoring dan Evaluasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Hasil Monitoring dan Evaluasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>2</b>	<b>Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah</b>	NTB.06.02	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi
1	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sosial		Data Statistik Sektoral Bidang Sosial yang tersedia
2	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Ekonomi		Data Statistik Sektoral Bidang Ekonomi yang tersedia
3	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur		Data Statistik Sektoral Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang tersedia
4	Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah		Masyarakat pengguna layanan data dan informasi pembangunan daerah
5	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah		Data dan Informasi yang terintegrasi dalam portal 1 data ntb
<b>3</b>	<b>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	NTB.06.03	Persentase informasi yang terpublikasi
1	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi		Hasil Hajian dan Pengembangan Sistem Informasi
2	Temu Pelajar Kreatif		Peserta Temu Pelajar Kreatif
3	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)		Kelompok Informasi Masyarakat SDM anggota KIM yang terlatih
5	Penguatan Kemitraan dengan Lembaga dan Pers		Lembaga dan Pers yang bermitra dalam penyebarluasan dan kualitas informasi Peserta Bimtek Jurnalistik
6	Publikasi Media Kreatif		kegiatan penyebaran informasi melalui media kreatif
7	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		Konten penyebaran informasi kepada publik melalui media publik
<b>4</b>	<b>Pengembangan e-Government</b>	NTB.06.04	Indeks SPBE
1	Pengembangan Data Center dan Data		OPD Pengguna Layanan Data Center

	Recovery Center		
2	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah		OPD yang terhubung dalam Jaringan Intra Pemerintah
3	Penguatan Tata Kelola TIK		Regulasi dan Hasil Koordinasi Penguatan Tata kelola TIK Nilai Indeks SPBE Pemprov NTB
4	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi TIK		Aplikasi SPBE Pemprov NTB  Aplikasi yang dikembangkan Dinas Kominfotik
<b>5</b>	<b>Pencegahan Korupsi</b>	NTB.06.05	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK Pesentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM
1	Pemeriksaan Tujuan Tertentu / Khusus		Pengaduan Masyarakat yang tertangani Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Hasil Probity Audit
2	Kegiatan Pencegahan Korupsi		Hasil Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Hasil Survey Integritas
3	Kegiatan SABER PUNGLI		Kasus OTT Pungli Hasil Monitoring dan Pembinaan Saber Pungli
4	Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D)		Hasil Monitoring TP4D
5	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada PD		Hasil Evaluasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Hasil Evaluasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
<b>6</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	NTB.06.06	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat
1	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik		Inovasi pelayanan publik terinventarisir  Replikasi inovasi pelayanan publik Penerima penghargaan pelayanan publik berprestasi
<b>7</b>	<b>Kerjasama Informasi dan Media massa</b>	NTB.06.07	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan
<b>8</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	NTB.06.08	Tingkat Kematangan UKPBJ
1	Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi NTB		Hasil monev Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi NTB
2	Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman		Hasil monev Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

3	Pengendalian administrasi pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup		Hasil monev pengendalian administrasi pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup
4	Pengendalian administrasi Pembangunan perhubungan dan tata ruang		Hasil monev Pengendalian administrasi Pembangunan perhubungan dan tata ruang
5	Pengendalian administrasi pembangunan ekonomi		Hasil monev dan Pengendalian administrasi pembangunan ekonomi
6	Pengendalian administrasi pembangunan sosial budaya		Hasil monev Pengendalian administrasi pembangunan sosial budaya
7	Pengendalian dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Tender pengadaan barang/jasa sesuai RUP
8	Pengendalian administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat		Hasil Monev Pengendalian administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat
9	Pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah		Peserta Pembinaan ULP/PBJ
10	Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah		Progress pengelolaan sistem elektronik PBJ
<b>9</b>	<b>Optimalisasi Pelayanan e-Procurement</b>	NTB.06.09	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar)
1	Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		OPD terlayani melalui LPSE
2	Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB		Standarisasi LPSE yang terpenuhi
<b>7</b>	<b>Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan</b>	NTB.07	Harapan Lama Sekolah
<b>1</b>	<b>Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)</b>	NTB.07.01	Rata-rata Lama Sekolah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Persen Penurunan Angka Drop Out (DO) Persentase Akreditasi SMA minimal B Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah
1	Pembangunan Gedung Sekolah		Gedung SMA
2	Penambahan ruang kelas sekolah		Ruang kelas sekolah yang dibangun
3	Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah		Ruang guru sekolah yang dibangun
4	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah		Laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang dibangun
5	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar/Tembok, dan Fasilitas Parkir		Taman, lapangan upacara, pagar/tembok dan fasilitas parkir yang dibangun
6	Pembangunan ruang ibadah		Ruang ibadah sekolah yang dibangun
7	Pembangunan perpustakaan sekolah		Ruang perpustakaan sekolah yang dibangun
8	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary		Sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun
9	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		Buku dan alat tulis siswa yang diadakan
10	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa		Alat praktek dan peraga siswa yang diadakan

11	Pengadaan mebeleur sekolah		Meublair sekolah yang diadakan
12	Pengadaan perlengkapan sekolah		Perlengkapan sekolah yang memadai
13	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah		Bangunan sekolah yang direhabilitasi
14	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah		Ruang kelas yang direhabilitasi
15	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum		Peserta Workshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum Kurikulum yang disusun
16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan Sekolah Menengah Atas
17	Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa		Siswa yang mengikuti pengembangan minat, bakat dan kreatifitas siswa
18	Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)		Data pendidikan SMA yang disinkronkan
19	Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA)		Sekolah sehat yang dibina
2	<b>Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)</b>	NTB.07.02	<p>Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C</p> <p>Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C</p> <p>Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS)</p> <p>Persen Penurunan Angka Drop Out (DO)</p> <p>Persentase Akreditasi SMK minimal B</p> <p>Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah</p> <p>Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi</p> <p>Rasio Siswa SMK terhadap SMA</p>
1	Pembangunan Gedung Sekolah		Gedung sekolah SMK dibangun
2	Penambahan ruang kelas sekolah		Ruang kelas baru SMK dibangun
3	Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah		Ruang guru dan ruang kepala sekolah SMK yang terbangun
4	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah		Ruang laboratorium SMK yang dibangun
5	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar/Tembok, dan Fasilitas Parkir		Taman, lapangan upacara, pagar/tembok dan fasilitas parkir untuk SMK
6	Pembangunan ruang ibadah		Ruang ibadah sekolah SMK yang dibangun
7	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary		Sarana air bersih dan sanitasi SMK yang dibangun
8	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa		alat praktek dan peraga siswa SMK yang diadakan
9	Pengadaan Meublair Sekolah		meublair sekolah SMK yang diadakan
10	Pengadaan perlengkapan sekolah		perlengkapan sekolah SMK yang memadai
11	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah		Bangunan sekolah SMK yang direhabilitasi
12	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah		Ruang kelas SMK yang direhabilitasi
13	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum		Peserta Workshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum Kurikulum SMK yang disusun
14	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri		Siswa yang tersertifikasi (LSP)

15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Hasil Monitoring dan Evaluasi
16	Peningkatan minat; bakat; dan kreativitas siswa	Lomba minat, bakat, dan kreativitas siswa
17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Hasil Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
18	Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	data pendidikan jenjang SMK
19	Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	sekolah sehat yang terbina
<b>3</b>	<b>Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)</b>	NTB.07.03 Persen Angka Partisipasi Kasar (APK)
1	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi Gedung Sekolah Luar Biasa (SLB)
2	Penambahan ruang kelas sekolah	Ruang kelas sekolah yang dibangun
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Hasil Monev
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	alat praktik dan peraga siswa
5	Pengadaan mebeleur sekolah	Meubelair sekolah yang diadakan
6	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Bangunan sekolah yang direhabilitasi
7	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi
8	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	Peserta Workshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum Kurikulum SLB yang disusun
9	Penyusunan bahan pembelajaran siswa SLB	Bahan Pembelajaran siswa SLB
10	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SLB	Peserta Peningkatan Tenaga Pendidik SLB yang berkompeten
11	Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa	siswa yang mengikuti peningkatan minat dan bakat kreativitas siswa
12	Sinkronisasi Data Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	data PKPLK yang Valid
<b>4</b>	<b>Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB</b>	NTB.07.04 Angka Drop Out SMA/SMK/SLB
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	siswa yang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS)
<b>5</b>	<b>Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	NTB.07.05
		Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/Mts
		Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
		Angka DO SD/MI
		Angka DO SMP / Mts
1	Advokasi dan Penyusunan berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan	Peraturan daerah/peraturan gubernur bidang pendidikan

2	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi		Peserta Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi
3	Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa		peserta lomba Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas SD dan SMP
4	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Semester Bersama		sekolah penyelenggara ujian soal ujian SD/MI, Paket A/Ula, dan SDLB Peserta ujian akhir sekolah an ujian semester bersama
5	Penyediaan Beasiswa S1, S2, dan S3		Peserta Intensive TOEFL dan IELTS Mahasiswa Penerima Beasiswa
6	Pengembangan Mutu Pendidikan		Jam Tatap muka Guru non pns Guru non pns
7	Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS		Layanan Operasional Manajemen BOS
<b>6</b>	<b>Pembinaan Ketenagaan</b>	NTB.07.06	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Kepala Sekolah bersertifikat Pengawas Sekolah bersertifikat Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya
1	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan		Guru yang difasilitasi memenuhi kualifikasi S1/DIV
2	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik		Tenaga Kependidikan yang mendapat penghargaan
3	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan		Guru dan tenaga kependidikan
4	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi		Guru dan Tenaga Pendidikan Berprestasi
5	Standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kebudayaan		Hasil Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah
6	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah		Kepala sekolah yang bersertifikat
7	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Capaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru calon kepala kepala sekolah SMA, SMK dan PKPLK yang mengikuti bimtek
8	Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PK-PLK		Guru yang mengikuti peningkatan kompetensi jenjang regional/ nasional
9	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan		Guru tidak tetap (GTT) dan Pengawai TU tidak tetap
10	Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap		Capaian Sistem kendali pendidikan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
11	Peningkatan Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan		

12	Olimpiade Sains Guru		Guru yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional
7	<b>Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan</b>	NTB.07.07	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan sarana pembelajaran berbasis TI yang diadakan
1	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi pendidikan		Peserta diklat Peningkatan SD Pengelola Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan
2	Peningkatan SDM pengelolaan balai teknologi komunikasi pendidikan		
3	Penyelenggaraan pemantauan dan pembinaan kegiatan balai teknologi komunikasi pendidikan		Sekolah yang dipantau
4	Penyediaan sarana media program pembelajaran interaktif teknologi komunikasi pendidikan		keping CD media pembelajaran
8	<b>Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	NTB.07.08	Pengunjung Perpustakaan per Tahun
1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar		Perpustakaan Komunitas/ sekolah / Rumah Ibadah / Desa/Kelurahan
2	Pengembangan minat dan budaya baca		Event Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca pengunjung perpustakaan Pengunjung Perpustakaan Keliling Pengunjung Kegiatan Storytelling
3	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Hasil Monev dan Pelaporan
4	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah		Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca
5	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca		Rencana Program Budaya Baca
6	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca		Konten Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
7	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah		koleksi perpustakaan yang disediakan
8	Penyelarasan pengembangan perpustakaan dan arsip		Regulasi Perpustakaan
9	Peningkatan SDM Perpustakaan		Peserta Bimtek Perpustakaan
10	Pelestarian bahan pustaka		Naskah pelestarian bahan pustaka
11	Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka/Karya Cetak dan Karya Rekam		Bahan Pustaka/Karya Cetak dan Karya Rekam
12	Digitalisasi Bahan Pustaka/Alih Media Koleksi Perpustakaan		Bahan pustaka yang dialih media
13	Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival		Peserta Lomba Sayembara dan Festival
9	<b>Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	NTB.07.09	Cakupan pembinaan atlet berprestasi
1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah		Hasil seleksi atlet berbakat dan sangat berbakat Kab./Kota, Peserta Festival Sepak Bola U12, U14, dan U16, 3 Keg
2	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		Event kompetisi olahraga
3	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat		Event pemassalan olahraga
10	<b>Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda</b>	NTB.07.10	Persentase sarana prasarana pemuda dan

<b>dan Olahraga</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana pemuda dan olahraga</li> <li>2 Peningkatan Sarana Olahraga</li> <li>3 Peningkatan Prasarana Olahraga</li> <li>4 Peningkatan Sarana Pemuda</li> <li>5 Peningkatan Prasarana Pemuda</li> </ol>	<p>olahraga yang terstandar</p> <p>Unit Sarana/Prasarana yang dipelihara</p> <p>Sarana Olahraga yang diadakan</p> <p>Prasarana Olahraga yang diadakan</p> <p>Sarana Pemuda yang diadakan</p> <p>Prasarana Pemuda yang diadakan</p>
<b>8 Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat</b>	NTB.08	Angka Harapan Hidup
<b>1 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>	NTB.08.01	<p>Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang mendapatkan pendampingan teknis program kesehatan ibu dan anak puskesmas yang mampu PKPR, PKRET, dan santun lansia</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan kesehatan ibu dan anak</li> <li>2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia</li> </ol>		
<b>2 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular</b>	NTB.08.02	<p>Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi</p> <p>SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/tidak menular</p> <p>cakupan imunisasi Kab/Kota</p> <p>Hasil analisis faktor resiko KLB</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik</li> <li>2 Peningkatan Imunisasi</li> <li>3 Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah</li> </ol>		
<b>3 Sumber Daya Kesehatan</b>	NTB.08.03	<p>Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan</p> <p>SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/tidak menular</p>
<p>Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan</li> </ol>		
<b>4 Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	NTB.08.04	<p>Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan</p> <p>jenis obat bufferstock yang diadakan di provinsi</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan</li> </ol>		
<b>5 Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	NTB.08.05	<p>Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana</p> <p>Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat</p> <p>Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat</p> <p>jenis obat untuk pelayanan kesehatan mata yang diadakan</p> <p>masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani</p> <p>Kunjungan Kesehatan Jiwa yang dilayani</p>
<p>Pengadaan peralatan dan perbekalan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 kesehatan termasuk obat generik esensial</li> <li>2 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan</li> <li>3 Peningkatan kesehatan masyarakat</li> </ol>		
<b>6 Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	NTB.08.06	<p>Nilai Akreditasi</p> <p>Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi</p>



1	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan		Dokumen Standar Pelayanan Kesehatan
2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan		Nilai tindak lanjut hasil Verifikasi akreditasi
3	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional		FKTP yang dibina agar memenuhi standar
4	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan		Rumah Sakit (RS) yang melaksanakan sistem rujukan terintegrasi
5	Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan		FKTP dan FKTL yang terakreditasi/reakreditasi
<b>7</b>	<b>Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	<b>NTB.08.07</b>	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar
1	Pembangunan rumah sakit		Gedung rumah sakit yang terbangun
2	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit		Alat Kesehatan/Kedokteran Yang tersedia
3	Pengadaan obat		jenis Obat Yang disediakan
4	Pengadaan ambulance/mobil jenazah		Ambulan/Mobil Jenazah Yang Disediakan
5	Pengadaan mebeleur rumah sakit		Mebeleur Yang tersedia
6	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain		Pneumatic Tube dan IPAL Yang Disediakan
			Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit yang diadakan
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	<b>NTB.08.08</b>	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		Gedung Yang Terpelihara
2	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit		Instalasi Limbah RS Yang Terpelihara
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat		Alat-alat Kesehatan/Kedokteran Yang Terkalibrasi/Terpelihara
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit		Perlengkapan RS Yang Terpelihara
5	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi		Ruang Operasi yang dipelihara
6	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit		Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipelihara
<b>9</b>	<b>Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>NTB.08.09</b>	Persentase balita stunting
1	Penanggulangan masalah gizi masyarakat		jenis obat atau bahan penanggulangan masalah gizi yang diadakan
2	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi		Sekolah yang mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan TTD dalam mensukseskan program GEN 2025
<b>10</b>	<b>Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>NTB.08.10</b>	Persentase Tempat tempat Umum yang Memenuhi Syarat
1	Peningkatan Penggunaan Air Bersih		sumber air bersih yang ditingkatkan kualitasnya
2	Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan		tempat tempat umum yang dibina
<b>11</b>	<b>Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>NTB.08.11</b>	Persentase Posyandu Aktif

1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat		media promkes yang dikembangkan di posyandu
2	Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat		Posyandu yang diaktifkan
3	Peningkatan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat		Puskesmas yang dibina dalam penerapan Desa Siaga dan Posyandu Keluarga
12	<b>Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD</b>	NTB.08.12	Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)
1	Pembekalan bagi Penyuluh tentang PUP		Penyuluh yg dibekali tentang PUP
2	Bimtek tentang PUP bagi tenaga Pendidik		Tenaga pendidik yang dibina tentang PUP
9	<b>Peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup</b>	NTB.09	Pengeluaran per kapita
1	<b>Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan</b>	NTB.09.01	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan
1	Penguatan organisasi pedagang kaki Lima dan asongan		Lembaga Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang diberikan pembinaan
2	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki Lima dan asongan		Jenis Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
10	<b>Peningkatan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</b>	NTB.10	Indeks Kualitas Air
1	<b>Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	NTB.10.01	Indeks Kualitas Udara
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan		Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya
2	Pengkajian Dampak Lingkungan		Hasil ukur baku mutu udara dan air kab/kota
3	Pengendalian Kerusakan Lingkungan		usaha/kegiatan yang taat terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertera dalam dokumen lingkungan
4	Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup		kabupaten/ kota yang terinventarisasi mempunyai kerusakan lahan dan pesisir
5	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tereview kelayakannya
6	Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3		fasilitasi inisiatif lokal adaptasi perubahan iklim melalui Proklamasi dan Adiwiyata
2	<b>Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil</b>	NTB.10.02	unit usaha/ kegiatan penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan
1	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial
2	Pelestarian dan Pemulihan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Kawasan Perairan dan Pesisir yang diawasi dan dikendalikan
3	Penataan Ruang Laut dan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau2 Kecil		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
			Penanganan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan
			Kawasan Konservasi Perairan
			Izin Lokasi Perairan dan Kesesuaian Ruang
			Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-

<p><b>3 Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem</b></p> <p>1 Pencegahan dan Pengamanan Hutan</p> <p>2 Penegakan Hukum Kehutanan</p> <p>3 Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati</p> <p>4 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</p>	<p>NTB.10.03</p>	<p>Rasio Kemampuan perlindungan hutan lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan hutan melalui sosialisasi dan patroli penyelesaian kasus Tipihut sampai P21 Kawasan Ekosistem Esensial yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya</p> <p>Flora dan Fauna Endemik NTB</p> <p>Tumbuhan Satwa Liar Kawasan Sumber Daya Alam Ekosistem</p> <p>Peta Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>Kejadian Bencana Kebakaran Hutan</p> <p>Titik api yang dikendalikan</p>
<p><b>4 Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial</b></p> <p>1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis</p> <p>2 Pengelolaan DAS</p> <p>3 Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>NTB.10.04</p>	<p>Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial</p> <p>Persentase penurunan luas lahan kritis Bibit yang diberikan kepada masyarakat</p> <p>Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang dibuat</p> <p>Kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya</p>
<p><b>5 Perencanaan Tata Ruang</b></p> <p>1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan</p> <p>2 Pembinaan Penyusunan RTR Kab/Kota</p>	<p>NTB.10.05</p>	<p>Persentase RTR yang disusun</p> <p>Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang tersusun</p> <p>Kegiatan pembinaan penyusunan RTR kab./Kota</p>
<p><b>6 Pemanfaatan Ruang</b></p> <p>1 Survey dan Pemetaan</p> <p>2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang</p>	<p>NTB.10.06</p>	<p>Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan</p> <p>Hasil Survey dan Pemetaan KSP</p> <p>Masyarakat yang mengikuti kegiatan</p> <p>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang</p>
<p><b>7 Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b></p> <p>1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang</p> <p>2 Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang</p> <p>3 Peningkatan Peran Serta TKPRD Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang</p>	<p>NTB.10.07</p>	<p>Penurunan Penyimpangan tata ruang</p> <p>bahan pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>PPNS Penataan Ruang yang diberdayakan</p> <p>Peran Serta TKPRD Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang</p>
<p><b>8 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b></p> <p>1 Kerjasama pengelolaan persampahan</p> <p>2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan</p>	<p>NTB.10.08</p>	<p>Persentase Pengurangan Sampah</p> <p>Persentase penanganan sampah</p> <p>Unit usaha pengelolaan sampah yang terbentuk</p> <p>Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)</p> <p>Bank sampah yang terbentuk</p>

<b>11 Peningkatan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha</b>	NTB.11	Nilai Realisasi Investasi
<b>1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	NTB.11.01	Nilai Realisasi Investasi
1 Peningkatan kerjasama antara dunia usaha		Kerjasama antar dunia usaha yang terbentuk
2 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal		Capaian Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
3 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah		Capaian pengelolaan sistem informasi penanaman modal di daerah
4 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal		Regulasi Perijinan yang disusun
5 Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		Indeks Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Publik
6 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal		Realisasi Penanaman Modal
7 Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Izin dan Non Izin Sektor ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterbitkan
8 Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan		Izin dan Non Izin Sektor Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan yang diterbitkan
9 Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Penanaman Modal, Infrastruktur dan Perhubungan		Izin dan Non Izin Sektor Penanaman Modal, Infrastruktur dan Perhubungan yang diterbitkan
<b>12 Peningkatan daya saing industri</b>	NTB.12	
<b>1 Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>	NTB.12.01	IKM yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi
1 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri		Sistem inovasi teknologi industri yang dikembangkan
2 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi		rekomendasi restrukturisasi peralatan produksi Peserta Bimtek IKM
<b>2 Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah</b>	NTB.12.02	Cakupan Ikm Yang Terbina
1 Penguatan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya		IKM yang mampu memanfaatkan sumberdaya melalui bimtek pengolahan dan manajemen sumberdaya bimtek pengolahan dan manajemen sumberdaya yang diselenggarakan Potensi Perindustrian/Indeks Geografis Komoditas Industri Agro
2 Pembinaan Industri Kecil Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri		kerjasama IKM dengan mitra usaha yang terjalin
3 Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan		IKM yang produknya tersertifikasi Halal dan teruji Mutu Produk Unggulan
3 Pendaftaran dan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intektual (HAKI)		IKM yang produknya terfasilitasi HKI, Sertifikasi Test Report, E-Katalog, E-Smart
<b>3 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	NTB.12.03	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi
1 Penguatan Kemampuan Teknologi		bantuan peralatan untuk pengembangan

Industri		IKM berbasis potensi
2 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur		IKM Logam dan mesin yang terfasilitasi SNI
3 Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Dan Hilir		industri turunan hasil smelter yang terfasilitasi Hasil koordinasi antara OPD hulu dan hilir
<b>4 Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>	NTB.12.04	Presentase wirausahawan muda
1 Penguatan Kewirausahaan Bagi Pemuda		wirausahawan muda yang dilatih
<b>5 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	NTB.12.05	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM
1 Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis		UKM Yang Dibina Dan Difasilitasi Pengembangan
<b>6 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</b>	NTB.12.06	Persentase Legalitas Usaha
1 Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah		Hasil Koordinasi Data KUMKM dengan 10 Kab / Kota se-NTB
<b>13 Peningkatan daya saing pariwisata</b>	NTB.13	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)
<b>1 Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	NTB.13.01	Angka kunjungan wisatawan
1 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata		Jaringan kerjasama dan media informasi promosi pariwisata yang diadakan
2 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri		Promosi Event yang dilaksanakan
3 Pengembangan statistik wisata terpadu		Hasil analisa pasar pariwisata Statistik pariwisata
<b>2 Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	NTB.13.02	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa)
1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata		Sarana dan prasarana pada 20 desa wisata
2 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan		Kegiatan workshop paket wisata Jenis dan Paket Wisata Unggulan kawasan strategis pariwisata
3 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata		Pelaksanaan sosialisasi wisata halal dan desa wisata
4 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi		Sarana dan prasarana pada 20 desa wisata
5 Penataan Destinasi Pariwisata di 10 kab/kota		kawasan strategis pariwisata
6 Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata		
<b>3 Pengembangan Kemitraan</b>	NTB.13.03	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar
1 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata		Pelaku wisata yang dilatih
2 Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya		Pokdarwis yang diberikan penyuluhan dan pendampingan Pokdarwis se NTB

4	<b>Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata</b>	NTB.13.04	Rata-rata Lama Menginap
1	Peningkatan Strategi Tata Kelola Atraksi dan Daya Tarik Wisata		Event atraksi wisata yang dikelola
2	Pelaksanaan Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata		festival atraksi budaya yang difasilitasi
3	Pengembangan Kerjasama Industri Kreatif		Workshop dan inovasi produk industri kreatif yang terselenggara
14	<b>Peningkatan produksi Sektor Primer</b>	NTB.14	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan
		NTB.14.01	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Ton) Produksi Padi (Ton GKG) Produksi Jagung (Ton PK) Produksi Kedelai (Ton Biji Kering) Produksi Cabe (Ton Buah Segar) Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah) Produksi Manggis (Ton Buah Segar) Produksi Tembakau (Ton Daun Kering) Produksi Kopi (Ton Berasan) Produksi Kakao (Ton Berasan) Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra) Produksi Mete (Ton Biji Kering) ) prasarana dan sarana produksi Pertanian/Perkebunan yang tersedia  Event promosi yang diikuti  komoditas unggulan yang dikembangkan  bantuan sarana produksi produk hortikultura  kebun/lahan usaha yang teregistrasi  bantuan sarana produksi produk Perkebunan  dokumen statistik yang dibuat  bantuan sarana produksi produk tanaman pangan  bantuan alat dan sarana fisik pengelolaan lahan dan air  Kebutuhan Pupuk (DBHCHT)  Bantuan sarana/prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
1	<b>Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>		
1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan		prasarana dan sarana produksi Pertanian/Perkebunan yang tersedia
2	Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah		Event promosi yang diikuti
3	Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah		komoditas unggulan yang dikembangkan
4	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk Hortikultura		bantuan sarana produksi produk hortikultura
5	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan		kebun/lahan usaha yang teregistrasi bantuan sarana produksi produk Perkebunan
6	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian		dokumen statistik yang dibuat
7	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk Tanaman Pangan		bantuan sarana produksi produk tanaman pangan
8	Pengelolaan Lahan dan Air		bantuan alat dan sarana fisik pengelolaan lahan dan air Kebutuhan Pupuk (DBHCHT)
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna		Bantuan sarana/prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2	<b>Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>	NTB.14.02	Persentase Penyuluh Yang ditingkatkan Kapasitasnya Program Penyuluhan yang disusun kegiatan pemberdayaan penyuluh yang dilaksanakan Hasil Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan
1	Penyusunan Programa Penyuluhan		Program Penyuluhan yang disusun
2	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan		kegiatan pemberdayaan penyuluh yang dilaksanakan
3	Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan		Hasil Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan

4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan		Penyuluh pertanian/perkebunan yang dilatih
<b>3</b>	<b>Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	NTB.14.03	Pertumbuhan Populasi Ternak
1	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak		Sarana dan prasarana pembibitan ternak yang diadakan
2	Pengawasan Lalu Lintas Produk Pangan Asal Hewan		RPH/TPH yang menghasilkan Produk Pangan diawasi
3	Peningkatan Pengelolaan RPH		RPH/TPH yang sesuai standar Higienis dan sanitasi
4	Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Ternak		Kelompok tani ternak yang meningkat kapasitas kelembagaannya
5	Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif		ternak betina produktif dicegah pemotongannya di RPH/TPH
6	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak		Populasi ternak
<b>4</b>	<b>Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	NTB.14.04	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS
1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak		Upaya Pencegahan dan pengendalian 5 PHMS
2	Pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat		reproduksi ternak dan penurunan kematian pedet
3	Pengamatan Penyakit Hewan		Penyebaran PHMS se NTB
<b>5</b>	<b>Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	NTB.14.05	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan
1	Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan Limbah Pertanian		Produksi Pakan Limbah Pertanian yang diolah
2	Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian		Kelompok Peternak dilatih Tekhnologi Pakan
<b>6</b>	<b>Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	NTB.14.06	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan
1	Eksposisi hasil peternakan		kegiatan expo/pameran/bazar/pasar murah yang diikuti
2	Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil peternakan		UKM Produk Peternakan yang di Bina
3	Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan		Kelompok Usaha Peternakan se NTB Usaha Bidang Peternakan yang dibina dan dikembangkan
<b>7</b>	<b>Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	NTB.14.07	Produksi perikanan Budidaya
1	Pengelolaan dan Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya		unit pembudidayaan ikan yang dibina untuk memenuhi standar dan sertifikasi CBIB
2	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan		Pembudidaya Ikan yang difasilitasi dan dibina
3	Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan		Pembenihan Ikan yang dibina untuk memenuhi standard sertifikasi CPIB
<b>8</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	NTB.14.08	Produksi perikanan Tangkap
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		Pelabuhan Perikanan yang melaksanakan Pelayan Terpadu
2	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan		Kelompok Nelayan yang dibina dan difasilitasi
3	Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan		sarana pemulihan sumberdaya ikan yang dibangun

<b>9 Pengelolaan Hutan</b>	NTB.14.09	<p>Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling</p> <p>Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya</p> <p>KPH yang dilakukan penataan batas ijin/usaha pemanfaatan HHBK, HHK, dan Jasling selain karbon</p> <p>unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perencanaan dan Tata Hutan</li> <li>2 Pengembangan Usaha Kehutanan</li> <li>3 Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan</li> </ol>		
<b>15 Peningkatan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin</b>	NTB.15	<p>Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)</p>
<b>1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin</b>	NTB.15.01	<p>Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial</p> <p>Penduduk Miskin Yang Dilayani operasi katarak</p> <p>Orang Yang Dikhitan</p> <p>Pasien Gizi Buruk Yang dilayani</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan operasi katarak</li> <li>2 Pelayanan sunatan masal</li> <li>3 Pelayanan Kesehatan pasien rujukan kasus gizi buruk</li> </ol>		
<b>2 Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya</b>	NTB.15.02	<p>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial</p> <p>Petugas dan pendamping sosial yang ditingkatkan kemampuannya</p> <p>Keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin yang diadakan PMKS yang memperoleh bantuan sosial</p> <p>Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan</p> <p>Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya</li> <li>2 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin</li> <li>3 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin</li> <li>4 Pemberdayaan fakir miskin</li> <li>5 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)</li> <li>6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ol>		
<b>3 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	NTB.15.03	<p>Persentase PMKS yang tertangani</p> <p>kasus/korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak yang ditangani</p> <p>Anak Terlantar, Anjal dan Ancat yang dibina</p> <p>Lanjut Usia yang dibina</p> <p>Penyandang Disabilitas yang dilayani dan direhabilitasi</p> <p>Bantuan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>korban penyalahgunaan Napza yang dilayani dan direhabilitasi</p> <p>penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditingkatkan keterampilannya</p> <p>Hibah Barang Untuk Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak</li> <li>2 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat )</li> <li>3 Pembinaan Lanjut Usia (LU)</li> <li>4 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</li> <li>5 Pelayanan dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza</li> <li>6 Peningkatan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> </ol>		



			Sosial (PMKS) (WRSE,BWBLP, Odk Dan Eks Pmb) Melalui Kube korban perdagangan orang/traffiking,pekerja migran bermasalah dan orang terlantar yang ditangani
		7	Pelayanan dan penanganan korban perdagangan orang/traffiking,pekerja migran bermasalah dan orang terlantar
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	NTB.15.04	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Dunia Usaha dan Dunia Industri yang berperan aktif penggerak wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSMB) SDM kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan Karang Taruna yang diberdayakan Lembaga Sosial Masyarakat yang diberdayakan Calon Penerima Gelar Daerah Peserta Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan
	1		Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
	2		Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
	3		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
	4		Pemberdayaan Karang Taruna
	5		Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
	6		Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
	7		Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	8		Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
<b>5</b>	<b>Jaminan Sosial</b>	NTB.15.05	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam yang mendapat jaminan sosial Kampung Siaga Bencana Korban bencana sosial yang mendapat jaminan sosial Keluarga yang mendapat jaminan sosial
	1		Jaminan Sosial bagi korban bencana alam
	2		Jaminan sosial bagi korban bencana sosial
	3		Jaminan sosial bagi keluarga
<b>16</b>	<b>Pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	NTB.16	Cakupan Air Minum
	<b>1 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah</b>	NTB.16.01	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah yang direncanakan sumur bor yang dibangun hasil pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah Air Tanah yang dikonservasi
	1		Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah
	2		Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah
	3		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah
	4		Konservasi Air Tanah
	<b>2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	NTB.16.02	Cakupan Air Minum Cakupan sanitasi Sarana dan Prasarana penyediaan dan pengolahan air minum yang diadakan sarana & prasarana air limbah yang dibangun DED Sarana Prasarana air minum
	1		Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
	2		Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
	3		Perencanaan penyediaan prasarana dan

	sarana air minum bagi masyarakat		yang dibuat
4	Perencanaan prasarana dan sarana air limbah		Dokumen perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah yang dibuat
3	<b>Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar</b>	NTB.16.03	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak
1	Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat		kelompok wirausaha sanitasi yang dibina
2	Peningkatan penggunaan jamban keluarga		Penambahan Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan jamban
4	<b>Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>	NTB.16.04	Rasio Elektrifikasi
1	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan		hasil pengendalian dan evaluasi bidang ketenagalistrikan
2	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan		sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang disediakan
3	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan		hasil pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan
5	<b>Pengembangan Perumahan</b>	NTB.16.05	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani
1	Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		Rumah Layak Huni dan Home Stay yang dibangun
2	Penyediaan dan pembangunan perumahan		Perumahan yang dibangun
3	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman		data/informasi yang dikumpulkan
4	Perencanaan Pembangunan Perumahan		Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Dan Database Perumahan Provinsi NTB
6	<b>Pengembangan Permukiman</b>	NTB.16.06	Persentase Permukiman yang tertata
1	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTB		RP3KP Provinsi NTB yang tersedia
2	Penyusunan DED Penataan Kawasan Kumuh		DED Penataan Kawasan Kumuh yang disusun
3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		kawasan kumuh yang ditangani
7	<b>Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial</b>	NTB.16.07	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi
1	Rehabilitasi rumah akibat bencana alam		Rumah Terdampak Bencana yang direhabilitasi/direkonstruksi
2	Mitigasi kawasan perumahan rawan bencana		Kawasan Perumahan Rawan Bencana disosialisasi mitigasi bencana
17	<b>Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan</b>	NTB.17	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
1	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)</b>	NTB.17.01	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
1	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan		Kawasan Rumah Pangang Lestari yang terbangun
2	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah		Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat yang tersedia
3	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan		Kawasan Mandiri Pangan yang dikembangkan

4	Pengembangan Lumbung Pangan		Lumbung Pangan yang terbangun//Stok Cadangan Pangan Masyarakat
5	Neraca Bahan Makanan (NBM)		Neraca Bahan Makanan
6	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)		Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan
7	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
8	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal		Peserta Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
9	Pertemuan Evaluasi Ketahanan Pangan		Hasil Evaluasi Ketahanan Pangan Peserta Pertemuan Evaluasi Ketahanan Pangan
10	Pemantauan Arus Distribusi Komoditas Pangan Pengembangan Percepatan		Komoditas yang dipantau Peserta Kampanya Percepatan
11	Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)		Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
12	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)		Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang dibina
13	Pengawasan Keamanan Pangan		komoditi yang diawasi
14	Pemantauan Harga Pangan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar		Komoditas dipantau
15	Prognosa Ketersediaan Pangan		Hasil Prognosa Ketersediaan Pangan
16	Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan		Peserta Bintek Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan
17	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan		Data/Informasi Ketahanan Pangan yang disusun
<b>2</b>	<b>Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	NTB.17.02	Angka Konsumsi Ikan
1	Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan		Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi standar
2	Pengembangan Usaha dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan		Ketersediaan Stok
3	Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan		Kegiatan Eksposisi dan Promosi GEMARIKAN
			Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan Ragam Olahan
<b>18</b>	<b>Penurunan pengangguran terbuka</b>	NTB.18	Tingkat Pengangguran Terbuka
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	NTB.18.01	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
1	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA)		Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi
2	Pemberdayaan Lembaga Pelatihan		Lembaga Pelatihan yang dibina
3	Peningkatan Kapasitas Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri		Peserta Pemagangan Luar Negeri
4	Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri		
5	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan		Kebutuhan Pelatihan
<b>2</b>	<b>Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja</b>	NTB.18.02	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
1	Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah		Pekerja Migran Bermasalah yang Dideportasi
2	Layanan Terpadu Satu Pintu		Pekerja Migran yang menerima layanan



## 20 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

NTB.20

### 1 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah
- 2 Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan
- 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi
- 4 Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 5 Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan
- 6 Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok
- 7 Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan
- 8 Data Penerimaan Retribusi dan PLL
- 9 Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL
- 10 Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya
- 11 Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PLL
- 12 Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 13 Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor
- 14 Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 15 Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 16 Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak
- 17 Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala
- 18 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor
- 19 Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah
- 20 Pengembangan Sistem Informasi
- 21 Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 22 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah
- 23 Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah

Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)

Proyeksi dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB

rekomendasi kesamsatan

Agent layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO

Proyeksi dan Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Proyeksi dan Realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan

Proyeksi dan Realisasi Penerimaan Pajak Rokok

Bagi Hasil Pajak Rokok Kab./Kota

Proyeksi dan realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, Bukan Pajak, DAU dan DAK

Realisasi Penerimaan Pendapatan Lain-Lain

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Potensi Retribusi Daerah

Hasil Pengawasan Tunggakan Retribusi dan Pendapatan Lainnya

Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

kendaraan Bermotor yang terjaring OPGAB

Kegiatan Pekan Sosialisasi Pajak/Pekan Panutan Pajak

Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diselesaikan dan ditindaklanjuti

Surat Teguran dan Penagihan pajak daerah yang disampaikan

Hasil survei kepuasan pelanggan pengguna jasa kesamsatan

Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan OPGAB

Rencana Target Pendapatan (Murni dan Perubahan)

Paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan

Paket Perangkat Keras Sistem Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah yang Dikembangkan

Paket Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Pengelola Sistem Informasi Pendapatan

## 21 Peningkatan Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat

NTB.21

### 1 Peningkatan Pelayanan Keagamaan

NTB.21.01 Prosentase Pelaksanaan kegiatan

1	Peningkatan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa		Keagamaan
2	Penguatan Pelaksanaan Embarkasi Haji NTB		Kegiatan Peningkatan Ketakwaan Kepada Tuhan YME yang dilaksanakan Pelaksanaan Kegiatan Embarkasi Haji NTB
3	Pelaksanaan STQ/MTQ Provinsi/Nasional		Calon Jama'ah Haji NTB Peserta STQ/MTQ Provinsi/ Nasional Hasil STQ/MTQ Provinsi/ Nasional
4	Diklat Pengelolaan Manajemen Masjid		Peserta Diklat Pengelolaan Manajemen Masjid
5	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)		Kegiatan LPTQ
6	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Kerukunan Umat Beragama / FKUB		Kegiatan FKUB
7	Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan/Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Bidang Keagamaan		Bantuan Keuangan/Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Bidang Keagamaan yang dievaluasi/diverifikasi
8	Pesona Khasanah Ramadhan		Pelaksanaan Kegiatan Khasanah Ramadhan
9	Peningkatan iman dan taqwa aparatur		Kegiatan IMTAQ untuk aparatur
<b>2</b>	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	NTB.21.02	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif
1	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat (KPM)		Kader Pemberdayaan Masyarakat terbina
2	Penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang dikuatkan
3	Bulan bakti gotong royong masyarakat		Kegiatan Bulan bakti gotong royong masyarakat
4	Monitoring dan evaluasi lumbung bersaing		Hasil evaluasi lumbung bersaing
5	Penguatan Kapasitas Paralegal		Paralegal Terbina
6	Penguatan kapasitas Lembaga Adat		Lembaga Adat terbina
<b>3</b>	<b>Pengembangan Nilai Budaya</b>	NTB.21.03	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan
1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		Kelompok Adat Budaya yang dikembangkan
<b>4</b>	<b>Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	NTB.21.04	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi
1	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air		Manuscript/Naskah Kuno yang di Dokumentasikan
2	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata		Event Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
3	Rehabilitasi/Renovasi/Rekonstruksi Benda Cagar Budaya (BCB)		Cagar budaya yang dirawat / dipugar
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	NTB.21.05	Persentase penyelenggaraan Festival seni
1	Penyelenggaraan festival budaya daerah		Event festival seni dan budaya
2	Peningkatan teknis sanggar seni		sanggar Seni yang difasilitasi/dibina
3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kesenian		Peralatan dan Perlengkapan Kesenian yang diadakan

<b>22 Peningkatan Kualitas &amp; Penegakan Produk Hukum Daerah</b>	NTB.22	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah
<b>1 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	NTB.22.01	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)
1 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan		Satlinmas yang terlatih
2 Pengendalian keamanan lingkungan		masyarakat yang mengikuti gelar pasukan satlinmas
3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa		kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai luhur Budaya Bangsa
<b>2 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	NTB.22.02	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub)
Pencegahan dan Penanggulangan		Pelaksanaan Kegiatan Terpadu/ operasi penertiban terhadap pelanggaran tibum
1 Potensi Konflik dan Gangguan Kemanan dan Ketentraman Kemasyarakatan		Pelaksanaan Kegiatan Turjawali
2 Peningkatan Kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI)		peserta rapat koordinasi pengawasan dan penegakan perda
3 Rapat Pengawasan Dan Penegakan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB		Pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengamanan dan penanganan asset
4 Pengawasan Pengamanan Dan Penanganan Aset Vital Pemda di Luar dan Dalam Daerah		operasi yustisi yang dilaksanakan
5 Operasi Yustisi Penegakan Produk Hukum Daerah		lokasi pengamanan, pengawalan pejabat dan tamu serta kegiatan pemda di Kab/Kota
6 Pengamanan/Pengawalan Pejabat (Gub/Wagub), tamu VIP/Tamu Pemda ke Kab/Kota se NTB		kegiatan pengawasan aparatur yang dilaksanakan
7 Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan terhadap Aparatur Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		Personil yang mengikuti gelar pasukan
8 Peningkatan pembinaan personil aparat praja wibawa		Petugas Khusus Wisata Halal yang terlatih
9 Bimbingan Teknis Petugas Khusus Wisata Halal		
<b>3 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	NTB.22.03	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat		peserta koordinasi tibum dan tranmas
1 Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		kegiatan operasi pekat terlaksana
2 Operasi Wibawa untuk Pemberantasan Pekat (Prostitusi, Gepeng, Anjal, Miras, Perjudian, Premanisme dan Narkoba)		masyarakat yang memahami pendeteksian dini dan pencegahan konflik
3 Pembekalan masyarakat dalam kemampuan pendeteksian dini dan pencegahan konflik di masyarakat		masyarakat yang mengikuti pembinaan patuh perda/perkada
4 Pembinaan Masyarakat Patuh Perda/Perkada melalui Pendekatan Kearifan Lokal		
<b>4 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	NTB.22.04	Penurunan Konflik Sosial
1 Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Kegiatan forum mitra pengendalian keamanan

<p><b>5 Penataan Peraturan Perundang-undangan</b></p> <p>1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah</p> <p>3 Penyebarluasan Produk Hukum Daerah</p>	NTB.22.05	<p>Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk</p> <p>Produk Hukum Daerah yang terbentuk</p> <p>Produk Hukum Daerah yang terfasilitasi/terevaluasi</p> <p>Produk Hukum Daerah yang tersosialisasi</p>
<p><b>6 Bantuan Hukum dan HAM</b></p> <p>1 Rencana Aksi Ham &amp; HAKI</p> <p>2 Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan</p> <p>3 Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pemda</p> <p>4 Pengkajian Naskah MoU &amp; Perjanjian Kerjasama</p>	NTB.22.06	<p>Persentase penanganan kasus-kasus hukum</p> <p>Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Rakor Aksi Ham &amp; HAKI</p> <p>Kasus/sengketa Hukum litigasi yang diselesaikan</p> <p>Kasus/sengketa Hukum non Litigasi Pemda yang diselesaikan</p> <p>MoU dan Perjanjian Kerjasama yang ditangani</p>
<p><b>23 Peningkatan kesadaran politik masyarakat</b></p>	NTB.23	<p>Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik</p>
<p><b>1 Pendidikan Politik Masyarakat</b></p> <p>1 Penyuluhan kepada masyarakat</p> <p>2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>3 Peningkatan peran partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas)</p>	NTB.23.01	<p>Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah</p> <p>masyarakat yang mendapat pendidikan politik</p> <p>Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Proposal permohonan bantuan hibah yang teverifikasi</p> <p>Partai Politik yang ada di Provinsi NTB</p> <p>Organisasi Masyarakat di Provinsi NTB</p>
<p><b>24 Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan</b></p>	NTB.24	<p>Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan</p>
<p><b>1 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.</b></p> <p>1 Penguatan Kelembagaan PUG</p>	NTB.24.01	<p>Persentase OPD yang mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)</p> <p>Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG</p> <p>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</p> <p>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</p>
<p><b>2 Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b></p> <p>1 Manajemen usaha bagi perempuan</p> <p>2 Temu PUSPA Daerah</p> <p>3 Pembangunan Ketahanan Keluarga</p>	NTB.24.02	<p>Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja</p> <p>Perempuan yang dibina Manajemen Usaha</p> <p>Peserta Temu PUSPA Daerah</p> <p>Motivator ketahanan keluarga yang dibina</p>
<p><b>3 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak</b></p>	NTB.24.03	<p>Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA</p>



<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Advokasi Percepatan KLA Bagi Kabupaten/ Kota</li> <li>2 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak</li> <li>3 Temu / Forum Anak Prov. NTB</li> <li>4 Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan</li> <li>5 Pendampingan dan Penangan Kasus</li> <li>6 Pendampingan Korban Kekerasan</li> <li>7 Upaya Perlindungan Anak di Sekolah</li> <li>8 Penguatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB</li> <li>9 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB</li> <li>10 Peningkatan kapasitas Mantan TKW</li> </ol>	<p>kab/kota yang diadvokasi percepatan KLA</p> <p>anak yang terseleksi mengikuti Temu/Forum Anak Prov. NTB</p> <p>Peserta sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan</p> <p>kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani</p> <p>Tenaga pendamping yang dilatih siswa yang mengikuti sosialisasi Upaya Perlindungan Anak di Sekolah</p> <p>Kegiatan Rakor/Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB</p> <p>Perempuan korban TPPO yang dilatih</p>
<p><b>4 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan</li> <li>2 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)</li> <li>3 Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan</li> </ol>	<p>NTB.24.04</p> <p>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan</p> <p>Perempuan korban tindak kekerasan yang ditangani</p> <p>Aktivis PATBM yang didibina</p>

## 7.3 Arsitektur Teknologi

Teknologi adalah suatu kesatuan sarana untuk menyediakan hal/barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi sangat dibutuhkan untuk mendukung reformasi birokrasi pada sistem pemerintahan. Salah satu usaha untuk mewujudkan hal itu, dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan pada sistem Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga di dukung dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2018 tentang tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu pedoman penggunaan teknologi pada sistem pemerintahan, khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini pedoman tersebut adalah Arsitektur Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

### 7.3.1 Arsitektur Infrastruktur TIK

Arsitektur Infrastruktur TIK merupakan kerangka dasar yang menerjemahkan strategi suatu perusahaan atau organisasi menjadi sebuah rencana utama, yang kemudian dijadikan pedoman dalam menentukan arah fokus perkembangan infrastruktur TIK dalam waktu yang sudah ditentukan. Biasanya pada pemerintahan, arsitektur infrastruktur TIK terwujud di dalam Master Plan atau rencana induk untuk jangka waktu 5 tahun, yang kemudian di rinci ke rencana kerja tahunan.

Infrastruktur TIK merupakan pondasi yang mendukung sebuah sistem atau lebih pada suatu organisasi. Karena itu, Infrastruktur TIK memegang peranan penting dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif, efisien, berkesinambungan, aksesibilitas, dan aman. Untuk mewujudkan itu semua, penyelenggaraan Infrastruktur TIK sebagai Infrastruktur SPBE sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE maka Infrastruktur SPBE harus dilakukan secara :

- mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
- terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
- menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

### 7.3.2 Fokus Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintah Provinsi NTB

Dalam mendukung layanan SPBE menurut Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Pemerintah Daerah hanya bertanggung jawab akan penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi atau Kab./Kota Namun demikian, pemerintah provinsi NTB merupakan Pembina bagi Kab/Kota. di Provinsi NTB. Sehingga dibutuhkan peranan pemerintah provinsi NTB untuk membantu atau mendukung pemerintah Kab./Kota dalam meningkatkan kualitas layanan SPBE di Provinsi NTB khususnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan tiga kegiatan yang menjadi fokus pemerintah provinsi NTB di Infrastruktur TIK, yaitu;

#### a. Penyediaan Pusat Data Provinsi NTB

Pusat Data Provinsi NTB merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Pemerintah Daerah di Provinsi NTB. Penyediaan ini akan memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah di Provinsi NTB untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data Provinsi NTB oleh Pemerintah Daerah di Provinsi NTB. Karena itu penyediaan Pusat Data Provinsi NTB akan dilakukan dengan memanfaatkan pusat data yang telah tersedia di seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi NTB dengan syarat minimal memenuhi standar ruang server atau NOC. Pusat Data Provinsi NTB akan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga akan lebih fleksibel. Komputasi awan juga

memungkinkan setiap Pemerintah Daerah di Provinsi NTB menjadikan Pusat Data nya sabagai Pusat Pemulihan Bencana. Sehingga apabila Pusat Data Provinsi NTB mengalami gangguan, Layanan SPBE di seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi NTB tidak akan terganggu. Dan dapat terwujudnya Pusat Data Provinsi NTB yang High Availability. Oleh karena itu, Pengembangan Pusat Data Provinsi akan di prioritaskan pada ;

- Gedung/Bangunan dan fasilitas Pusat Data Provinsi, yaitu gedung/bangunan dimana Pusat Data Provinsi di tempatkan harus memiliki bangunan yang kuat, tahan gempa, tidak bocor dan komprehensif, karena Pusat Data akan menjadi tempat sumber informasi dan layanan SPBE. Sehingga harus memiliki penjagaan keamanan secara fisik yang baik dan gedung yang memiliki resiko paling minimum dalam kemungkinan membahayakan aset pada Pusat Data Provinsi. Apabila Pusat Data Provinsi mengalami gangguan, maka akan berdampak pada layanan SPBE seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi NTB. Dari segi fasilitas, Pusat Data Provinsi harus memiliki instansi listrik yang baik dan stabil, memiliki tenaga listrik cadangan (genset dan ups) dan memiliki 30% kapasitas listrik yang tidak terpakai. Secara keseluruhan Pusat Data Provinsi NTB harus berpedoman pada Standar TIER 1 atau TIER 2 atau standar lainnya yang dikenal secara nasional atau internasional.
- Platform Teknologi yang digunakan komputasi awan yang bersifat Open Source, Virtualisation enable, High Availability dan Redundant. Open Source bertujuan agar dapat mengembangkan source sesuai kebutuhan secara mandiri, mengurangi anggaran pemeliharaan dan meningkatkan efisiensi anggaran. Sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih banyak berinvestasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Virtualisation enable, agar dapat menggunakan teknologi dengan lebih efektif dan efisien, untuk contoh; hanya dengan satu server dapat digunakan untuk banyak server virtual. High Availability ini sangat penting, agar menghindari terjadi nya down time pada layanan SPBE, sehingga Pusat Data Provinsi memiliki gateway lebih dari satu yang berjalan secara paralel yang membagi beban transaksi data secara baik, dan menggunakan alamat IP lebih dari satu. Terakhir Redundant yaitu, setiap perangkat selalu memiliki cadangan yang sudah dikonfigurasi sedemikian rupa, sehingga ketika terjadi gangguan pada perangkat utama, perangkat cadangan otomatis menggantikan peran dari perangkat utama. Ini juga berlaku untuk perangkat pusat penyimpanan dalam hal ini menggunakan NAS (network attached storage), sehingga data tidak gampang hilang atau terganggu.

#### b. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi NTB

Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah provinsi NTB. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah Provinsi NTB ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan pada Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya. Jaringan Intra Pemerintah Provinsi NTB meliputi jaringan yang menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Provinsi NTB dan yang menghubungkan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab./Kota di Provinsi NTB. Ada 3 pilihan platform teknologi yang dapat digunakan pada Jaringan Intra Pemerintah Provinsi NTB, yaitu :

- VPN (Virtual Private Network), merupakan suatu jaringan khusus yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan Internet yang bersifat sangat aman dan umumnya menggunakan teknologi MPLS. Biaya penggunaan VPN dari penyedia layanan internet masih sangat mahal bagi pemerintah provinsi NTB.
- Local Loop/Leased line, merupakan suatu jaringan yang disewakan oleh penyedia layanan internet yang bersifat Local area network atau hanya menyewakan jalur jaringan tanpa layanan internet. Layanan ini relatif terjangkau dan cocok untuk kebutuhan Pemerintah Provinsi NTB saat ini.

- VPN Client – Server, merupakan suatu aplikasi atau sistem yang dapat membuatkan jalur khusus di dalam jalur internet biasa dengan parameter yang sudah ditentukan. VPN ini bersifat aman dan sangat bergantung pada keahlian teknis dalam mengkustom konfigurasi pada VPN client - server. platform ini paling berbiaya rendah diantara pilihan lainnya.

### c. Penyediaan Sistem penghubung layanan pemerintah

Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi NTB menggunakan SiMANTRA sebagai penghubung ketika melakukan integrasi. Tujuan penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE. Selain itu Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, Standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah. Layanan SiMANTRA sangat baik dalam melakukan integrasi berbagai sistem dengan platform yang berbeda dengan tetap menjaga keamanan database masing – masing sistem dengan baik. SiMANTRA di Pemerintah Provinsi NTB sudah digunakan sejak beberapa tahun lalu, dan akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan integrasi berbagai sistem pada Pemerintah Provinsi NTB.

Diharapkan dengan suksesnya tiga kegiatan fokus pada Infrastruktur TIK Pemerintah Provinsi NTB akan memberikan efek domino ke arah lebih baik pada layanan SPBE seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi NTB. Hal itu dikarenakan, dengan suksesnya kegiatan Pusat Data Provinsi NTB, Jaringan Intra Pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah maka akan dapat diwujudkan suatu BIG DATA Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang berkelanjutan. Dengan memiliki Big Data yang berkelanjutan, maka akan dapat melakukan suatu Data analytics dengan menggunakan Teknologi kecerdasan buatan, yang dapat membantu seluruh Pimpinan Pemerintah Daerah di Provinsi NTB mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Sehingga kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah Daerah akan lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat di Provinsi NTB.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Induk Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi dasar kebijakan dan rujukan teknis dalam membangun SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Dokumen Rencana Induk SPBE ini perlu disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE. Tim Koordinasi SPBE Provinsi NTB memegang peranan yang sangat penting dalam menterjemahkan dan mengimplementasi setiap inisiatif strategis SPBE yang disampaikan dalam dokumen rencana induk ini.

Melalui pengembangan SPBE yang mengacu pada dokumen Rencana Induk SPBE ini diharapkan tercapainya visi yang diharapkan yakni Mewujudkan NTB Smart Province yang menghadirkan birokrasi berkinerja tinggi dan layanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Visi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan, sasaran dan strategi. Semua itu menjadi rujukan dalam penentuan inisiatif strategis yang perlu dilaksanakan dalam pengembangan SPBE di Pemerintah Provinsi NTB. Inisiatif Strategis SPBE dikelompokkan dalam 4 area, yaitu Tata Kelola SPBE, Infrastruktur SPBE, Layanan SPBE, dan Sumber Daya Manusia SPBE.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Rencana Induk SPBE Provinsi NTB ini telah disusun sedemikian rupa agar dapat mengakomodir semua kebutuhan dari berbagai faktor agar dapat mewujudkan e-Government yang bermanfaat, selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB, namun sebuah perencanaan yang baik sekalipun harus memberikan ruang bagi perubahan dan alternatif dengan memperhatikan perkembangan dunia teknologi informasi secara global, perubahan kebijakan pemerintah dan ketersediaan sumber daya lokal. Karenanya sangat disarankan agar secara reguler dokumen rencana induk e-government ini perlu ditinjau ulang dan dievaluasi untuk selanjutnya dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH